

62f.52  
mub

k 21



**KAJIAN KINERJA  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR / P3A  
DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Pernyataan  
Program Magister Teknik Sipil**

**Oleh :**

**Mohammad Alif Mudjahidin**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **TESIS**

### **KAJIAN KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

Disusun oleh :

**Mohammad Alif Mudjahidin**  
NIM. L4A 099029

Dipertahankan di Depan Tim Penguji tanggal :

23 Desember 2003

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister Teknik Sipil

Tim Penguji :

1. Ir. Pranoto SA, Dipl.HE., MT

(Ketua)

: 

2. Ir. Agus Suroso, SU

(Sekretaris)

: 

3. Ir. Sriyana, MS

(Anggota 1)

: 

4. Ir. Sugiyanto, M.Eng.

(Anggota 2)

: 

5. Dr.Ir. Suripin, M. Eng.

(Anggota 3)

: 

Semarang, 29 Desember 2003

Universitas Diponegoro  
Program Pascasarjana  
Magister Teknik Sipil

Ketua,



**Dr.Ir. Suripin, M. Eng.**  
NIP. 131 668 511

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, *Tesis* dengan judul : ' *Kajian Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi* ' bisa terselesaikan sebagai penyempurnaan hasil Seminar Analisis Data yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2003. Sebagai salah satu syarat pada program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Tesis ini secara garis besar berisi :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

B A B III : Metode Penelitian.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan.

B A B V : Kesimpulan dan Saran.

Dengan latar belakang bahwa selama ini pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi didominasi Pemerintah, maka selayaknya sebuah kajian dilaksanakan untuk membantu masyarakat petani pemanfaat air dalam melaksanakan wewenang pengelolaan jaringan irigasi sebagai paradigma baru reformasi pengelolaan irigasi.

Dengan terselesaikannya Revisi *Tesis* ini, kami sampaikan ucapkan terima kasih atas segala jerih payah dan usaha Bapak Ir. Pranoto SA, Dipl.HE MT, dan Bapak Ir. Agus Suroso, SU, selaku Pembimbing, Bapak Ir. Sriyana MS, Ir. Sugiyanto, M.Eng., dan Dr. Ir. Suripin M.Eng. selaku Pembahas, karena telah banyak memberi arahan, masukan dan bimbingan atas arah dan isi *Tesis* ini.

Semoga *Tesis* ini dapat diterima dan dapat memberikan sumbang saran bagi masyarakat petani dalam usahanya meningkatkan usaha pertanian dan memperbaiki taraf hidupnya.

Semarang, Desember 2003.

Mohammad Alif Mudjahidin.  
Penyusun

## **KAJIAN KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI**

### **Abstraksi**

*Pada bulan April 1999 Pemerintah menyiapkan pembaharuan di bidang Irigasi dengan dikeluarkannya INPRES 3/99 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP 77 / 2001 tentang Irigasi. Salah satu kebijakan utamanya adalah menjadikan petani sebagai pemeran utama dalam pengelolaan irigasi dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan untuk areal > 500 ha.*

*Pada tahun 2000 Pemerintah menyerahkan DI Krisak luas 839 ha di Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan luas 715 ha di Kabupaten Magelang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dua daerah irigasi tersebut menjadi lokasi studi kasus Kajian Kinerja P3A dalam mengelola jaringan irigasi dan kinerja jaringan irigasi yang telah dikelola P3A pasca penyerahan. Dengan menganalisis hasil isian kuesioner yang disebar di 8 populasi G/P3A (1 GP3A + 7 P3A) DI Krisak dan 9 populasi G/P3A (1 GP3A + 8 P3A) DI Krogowanan, tingkat/status kinerja lembaga P3A dan kinerja jaringan irigasi dapat diketahui. Untuk meningkatkan tingkat/status kinerja P3A dalam mengelola jaringan irigasi dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan perlu disusun formulasi strategis P3A dalam mengelola jaringan irigasi dengan metode SWOT.*

*Hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja P3A pada status Cukup Baik (50% - 59.57%), meliputi aspek organisasi Cukup Baik (50% - 62.50%), pemanfaatan air Cukup Baik (50% - 70.25%), pemeliharaan jaringan irigasi Kurang Baik (33.33% - 50%), keuangan Kurang Baik (45.56% - 50%), kondisi fisik jaringan irigasi Cukup Baik (50% - 75%) dan pembinaan P3A Cukup Baik (55.92% - 75%). Tingkat kinerja jaringan irigasi pada status Cukup Baik (61.45% - 71.96%) meliputi aspek kondisi fisik mencakup pemeliharaan Cukup Baik (55% - 60%), pengembangan P3A di bidang irigasi Cukup Baik (70% - 80%), pengelolaan air irigasi Sangat Baik (75% - 89.87%) dan pengembangan pertanian Kurang Baik (45.80% - 54.17%). Rumusan formulasi strategis menghasilkan; (i) memperkuat kelembagaan P3A (ii) P3A berbadan hukum berpeluang meningkatkan kualitas SDM (iii) P3A harus meningkatkan pengetahuannya dibidang jejaring informasi (iv) memanfaatkan pembinaan Dinas Teknis dengan program-program berdaya-guna sesuai dengan usulan P3A.*

## **STUDY OF WATER USER ASSOCIATION (WUA) PERFORMANCE'S IN IRRIGATION MANAGEMENT.**

### **Abstract**

*In April 1999 the Government of Indonesia was announced for Irrigation Management Reform Policy which by INPRES 3 / 1999 concerned in PKPI and formalized in PP 77 / 2001 concerned in Irrigation. One of the principle role was redefined of tasks and responsibility of irrigation management institutions to ensure a larger role (area > 500 ha) for the Water User Association Federation (WUAF) in decision taking.*

*In year 2000 Krisak Irrigation scheme area 839 ha in District of Wonogiri and Krogowanan Irrigation scheme area 715 ha in District of Magelang was transferred to WUA by Government. Based on 2 Pilot Project, The Study of Water User Association (WUA) performance in irrigation management and the irrigation scheme performance post the irrigation management transfer period. The questionnaire was distributed for 8 population of WUAF/WUA's (1 WUAF + 7 WUA's) for DI Krisak and 9 population of WUAF/WUA's (1 WUAF + 8 WUA's) for DI Krogowanan to analyze the status of WUA performances and irrigation schemes performances. To develop the WUA performance 'one system one management' concept, the strategic formula must be analyze by SWOT method.*

*Results of this study indicate the status of WUA performance are in Good level (50% - 59,57%) consist of Organization Aspect in Good level (50% - 62.50%), Water Supply aspect in Good level (50% - 70.25%), Maintenance aspect in Poor level (33.33% - 50%), Financial aspect in Poor level (45.56% - 50%), Present condition of Irrigation Schemes aspect in Good level (50% - 75%), WUA empowerment aspect in Good level (55.92% - 75%). The Status of Irrigation Schemes performance are in Good level (61.45% - 71.96%) consist of Physical condition aspect in Good level (55% - 60%), WUA Development aspect in Good level (70% - 80 %), Water Distribution aspect in Very Good level (75% - 89.87%). and Agriculture Development in Poor level (45.80% - 54.17%). The Strategic Formula was presented : (i) Strengthening the capacity of WUA (ii) Legalization of WUA support into Qualified of other WUA members (farmers) (iii) WUA must be learned in the network-information system (iv) The WUA's capacity building by Government must be in the farmer- need assessment preparation.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>ABSTRAKSI (versi Bahasa Indonesia)</b>	v
<b>ABSTRACT (versi Bahasa Inggris)</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Perumusan Masalah.	2
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian.	5
1.5. Sistematika Penulisan.	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
2.1. Telaah Pustaka.	8
2.1.1. Pengertian Kinerja.	8
2.1.2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).	8
2.1.3. Pengelolaan Irigasi.	9
2.1.4. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.	9
2.1.5. Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi.	12
2.2. Kewenangan pengelolaan irigasi.	12
2.2.1. Pengelolaan Irigasi oleh Kabupaten/Kota.	12
2.2.2. Pengelolaan Irigasi oleh Provinsi.	13
2.3. Lembaga Pengelola Irigasi (LPI).	13
2.3.1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.	14
2.3.2. Unit Pelaksana Teknis (Balai) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.	14
2.3.3. Dinas/Sub Dinas Pengairan di Kabupaten Magelang dan Wonogiri.	15
2.3.4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat Desa.	16
2.3.4.1. <u>P3A Desa Daerah Irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang.</u>	18
2.3.4.2. <u>P3A Desa Daerah Irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri.</u>	18
2.3.5. Gabungan / Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).	19
2.3.5.1. <u>Gabungan P3A se wilayah DI Krogowanan.</u>	20

2.3.5.1.	<u>Gabungan P3A se wilayah DI Krogowanan.</u>	20
2.3.5.2.	<u>Gabungan P3A se wilayah DI Krisak.</u>	21
<b>2.4.</b>	<b>Landasan Hukum Pengelolaan Irigasi.</b>	<b>22</b>
2.4.1.	Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.	22
2.4.2.	Peraturan Pemerintah Nomer 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.	23
2.4.3.	Peraturan Pemerintah Nomer 23 tahun 1982 tentang Irigasi.	23
2.4.4.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).	24
2.4.5.	Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 tentang PKPI.	24
2.4.6.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi.	25
2.4.7.	Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.	26
2.4.8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR).	28
2.4.9.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemerintah Urusan Otonomi Daerah Nomer No.611/3002/PUOD tahun 1998 tentang Pembaharuan Pelaksanaan IPAIR dengan Pola Baru (Pemberdayaan P3A).	29
2.4.10.	Peraturan Pemerintah nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.	30
<b>2.5.</b>	<b>Kerangka Perencanaan Strategis.</b>	<b>30</b>
<b>2.6.</b>	<b>Hipotesa</b>	<b>31</b>
<b>BAB III.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>32</b>
<b>3.1.</b>	<b>Rancangan Penelitian.</b>	<b>32</b>
3.1.1.	Lingkup Penelitian.	32
3.1.2.	Lokasi.	34
3.1.2.1.	<u>Lokasi Daerah Irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang.</u>	34
3.1.2.2.	<u>Lokasi Daerah Irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri.</u>	38
3.1.3.	Populasi.	41
3.1.3.1.	<u>Populasi DI Krogowanan Kabupaten Magelang.</u>	41
3.1.3.2.	<u>Populasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri.</u>	41
3.1.4.	Sampel.	41
3.1.4.1.	<u>Sampel DI Krogowanan Kabupaten Magelang.</u>	42
3.1.4.2.	<u>Sampel DI Krisak Kabupaten Wonogiri.</u>	42
<b>3.2.</b>	<b>Alat Ukur.</b>	<b>44</b>
3.2.1.	Mengukur Tingkat Kinerja.	44
3.2.1.1.	<u>Mengukur kinerja kelembagaan P3A dan GP3A.</u>	45
3.2.1.2.	<u>Mengukur kinerja jaringan irigasi.</u>	45
<b>3.3.</b>	<b>Menyusun Formulasi Strategis menggunakan metode SWOT.</b>	<b>54</b>
3.3.1.	Proses Analisis SWOT.	55
3.3.2.	Kerangka Analisis.	55
3.3.2.1.	<u>Tahap Penyusunan aspek-aspek analisis.</u>	57

3.3.2.2.	<u>Tahap Analisis.</u>	57
3.3.2.3.	<u>Tahap Penysunan Formulasi Strategis</u>	58
<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	<b>60</b>
4.1.	<b>Analisis Data Kuesioner Kinerja O&amp;P JI dan Kinerja P3A.</b>	<b>60</b>
4.1.1.	Hasil Evaluasi Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	63
4.1.2.	Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi.	66
4.2.	<b>Pembahasan Hasil Evaluasi.</b>	<b>69</b>
4.2.1.	Pembahasan Kinerja P3A.	69
4.2.2.	Pembahasan Kinerja Jaringan Irigasi.	72
4.3.	<b>Menyusun Formulasi Strategis.</b>	<b>74</b>
4.3.1.	Menyusun dan Menentukan Faktor Strategi Eksternal.	74
4.3.2.	Menyusun dan Menentukan Faktor Strategi Internal.	75
4.3.3.	Menyusun Matrik Eksternal-Internal.	76
4.3.4.	Menyusun Matrik SWOT.	77
4.3.5.	Menyusun Formulasi Strategis.	79
<b>BAB 5.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>81</b>
5.1.	<b>Kesimpulan.</b>	<b>81</b>
5.1.1.	Kinerja Lembaga G/P3A.	81
5.1.2.	Kinerja Jaringan Irigasi.	82
5.1.3.	Status Kelembagaan G/P3A.	83
5.1.4.	Formulasi Strategis (Hasil analisis SWOT).	84
5.2.	<b>Saran.</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>89</b>



## **DAFTAR TABEL.**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1.</b> Daftar Daerah Irigasi Kajian DI Krisak dan DI Krogowanan.....	4
<b>Tabel 2.1.</b> Jenis Kegiatan dalam Pengelolaan Irigasi .....	9
<b>Tabel 2.2.</b> Daftar P3A Desa di DI Krogowanan Kabupaten Magelang.....	18
<b>Tabel 2.3.</b> Daftar P3A Desa di DI Krisak Kabupaten Wonogiri .....	19
<b>Tabel 2.4.</b> Rekapitulasi Realisasi IPAIR Propinsi Jawa Tengah 1990/91-1998/99.	29
<b>Tabel 2.5.</b> Tanggungjawab Pengelolaan Irigasi dari Tahun ke Tahun.....	30
<b>Tabel 3.1.</b> Lokasi, Populasi G/P3A dan Sampel DI Krogowanan .....	42
<b>Tabel 3.2.</b> Lokasi, Populasi G/P3A dan Sampel DI Krisak .....	43
<b>Tabel 3.3.</b> Kriteria Penilaian Kinerja Kelembagaan G/P3A .....	49
<b>Tabel 3.4.</b> Kriteria Penilaian Kinerja Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi.....	53
<b>Tabel 3.5.</b> Matrik S W O T .....	58
<b>Tabel 4.1.</b> Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja G/P3A .....	61
<b>Tabel 4.2.</b> Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja O&P Jaringan Irigasi.....	62
<b>Tabel 4.3.</b> Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja P3A Desa .....	63
<b>Tabel 4.4.</b> Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Gabungan P3A .....	63
<b>Tabel 4.5.</b> Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi (tersier) DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang .....	67
<b>Tabel 4.6.</b> Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi (jaringan utama) DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang .....	67
<b>Tabel 4.7.</b> Perbandingan Prosentase Nilai Kuesioner Pengelolaan Irigasi oleh P3A dan Pemerintah .....	72
<b>Tabel 4.8.</b> Penentuan Faktor Strategi Eksternal .....	75
<b>Tabel 4.9.</b> Penentuan Faktor Strategi Internal .....	76
<b>Tabel 4.10.</b> Matrik Eksternal – Internal .....	77
<b>Tabel 4.11.</b> Matrik S W O T .....	78

## **DAFTAR GAMBAR.**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1.1.</b> Peta Lokasi Kajian Kinerja P3A Dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi.	7
<b>Gambar 2.1.</b> Prosedur Operasi Jaringan Irigasi .....	10
<b>Gambar 2.2.</b> Prosedur Pemeliharaan Jaringan Irigasi .....	11
<b>Gambar 2.3.</b> Bagan Organisasi Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah.....	14
<b>Gambar 2.4.</b> Bagan Organisasi Balai PSDA Propinsi Jawa Tengah.....	15
<b>Gambar 2.5.</b> Bagan Organisasi Sub-Dinas Pengairan Kabupaten/Kota.....	16
<b>Gambar 2.6.</b> Bagan Organisasi P3A Desa di Kabupaten Magelang dan Wonogiri.	17
<b>Gambar 2.7.</b> Bagan Organisasi Gabungan P3A .....	20
<b>Gambar 2.8.</b> Susunan Organisasi Gabungan P3A Tirto Makmur .....	21
<b>Gambar 2.9.</b> Susunan Organisasi Gabungan P3A Sapta Rata Tirta .....	22
<b>Gambar 2.10.</b> Alur Usulan Penyediaan Dana Eksploitasi dan Pemeliharaan JI .....	27
<b>Gambar 3.1.</b> Bagan Alir Kajian Kinerja P3A dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi .	33
<b>Gambar 3.2.</b> Peta Wilayah Kerja DI Krogowanan Kabupaten Magelang .....	36
<b>Gambar 3.3.</b> Skema Irigasi DI Krogowanan Kabupaten Magelang .....	37
<b>Gambar 3.4.</b> Peta Wilayah Kerja DI Krisak Kabupaten Wonogiri .....	39
<b>Gambar 3.5.</b> Skema Irigasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri .....	40
<b>Gambar 3.6.</b> Proses Analisis SWOT.....	55
<b>Gambar 3.7.</b> Formulasi Strategis.....	56

## **DAFTAR SINGKATAN.**

AD/ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
AKNOP	: Angka Kebutuhan Nyata Operasi & Pemeliharaan.
AKNPI	: Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi.
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
DI	: Daerah Irigasi.
DIP	: Daftar Isian Proyek.
DUP	: Daftar Usulan Proyek.
EOM	: Efficient Operation and Maintenance.
FSI	: Faktor Strategi Internal.
FSE	: Faktor Strategi Eksternal.
GP3A	: Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.(tingkat sekunder)
IPAIR	: Iuran Pelayanan Air Irigasi.
IP3A	: Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.(tingkat 1 daerah irigasi).
JI	: Jaringan Irigasi.
KPL	: Kelompok Pembina Lapangan.
Kimpraswil	: Pemukiman Prasarana Wilayah.
LPI	: Lembaga Pengelola Irigasi.
NBB	: Need Base Budget.
O&P	: Operasi dan Pemeliharaan.
P3A	: Perkumpulan Petani Pemakai Air. (tingkat desa/petak/unit)
PP	: Peraturan Pemerintah.
PSDA	: Pengelolaan Sumber Daya Air.
SWOT	: Strength Weakness Opportunity Threat.
Tu-pok-si	: Tugas Pokok dan Fungsi.

**DAFTAR LAMPIRAN.**

	<b>Halaman</b>
<b>Lampiran 1.</b> Kuesioner Kinerja Kelembagaan G/P3A .....	89
<b>Lampiran 2.</b> Kuesioner Kinerja Jaringan Irigasi .....	123

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang.**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi yang merupakan tindak lanjut kebijakan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi. PP No. 77 tahun 2001 menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1982 (periksa PP No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi) P3A telah mengelola jaringan irigasi di tingkat tersier. Dengan diterbitkannya PP No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi, P3A akan mempunyai wewenang mengelola jaringan irigasi di tingkat tersier, sekunder, primer hingga bangunan utama dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan jaringan irigasi. Ada kekhawatiran akan keberlanjutan/kesinambungan kinerja jaringan irigasi secara menyeluruh bila P3A melaksanakan wewenang mengelola jaringan irigasi tersebut. Hal tersebut cukup beralasan mengingat pada saat P3A hanya mempunyai tanggung jawab mengelola jaringan tersier, hasil produksi tanaman tidak mencukupi untuk memberikan hasil yang memadai untuk mencukupi kehidupan keluarga dan mengelola jaringan tersier, apalagi kebijakan Pemerintah yang baru akan memberi tambahan tanggung jawab P3A untuk mengelolajaringan irigasi di tingkat sekunder dan primer. Hal tersebut akan berimplikasi pada kualitas tanggung jawab yang diemban oleh P3A.

Disisi yang lain keleluasaan mengelola jaringan irigasi bagi P3A mempunyai banyak makna. Kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut seharusnya bermakna bahwa P3A mempunyai potensi dalam mengelola jaringan irigasi, sehingga dalam merencana dan melaksanakan sistem irigasi dalam 1 DI, P3A mempunyai kewenangan memutuskan keinginannya sesuai dengan air yang ada (keandalan air) dan jenis tanaman yang akan ditanam oleh P3A, yang menurut mereka menguntungkan secara ekonomi. Sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

Potensi yang masih terpendam dalam organisasi P3A, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan pengelolaan irigasi haruslah diberdayakan untuk memerankan P3A sebagai pengelola irigasi yang otonom dan mandiri. Usaha pemberdayaan tersebut merupakan usaha bersama Pemerintah dan masyarakat yang dapat diformulasikan secara optimal berdasarkan masukan-masukan positif, salah satunya adalah usaha membuat kajian kinerja organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dan kinerja P3A dalam mengelola (operasi dan pemeliharaan) jaringan irigasi (mulai tersier, sekunder, primer hingga bangunan utama).

## **1.2. Perumusan Masalah.**

Jaringan irigasi harus tetap terjaga kinerjanya walaupun pengelola yang sebelumnya adalah Pemerintah (sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi) dan kini Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang akan melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi (sesuai Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi). Agar kinerja jaringan irigasi yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat menyediakan dan mendistribusikan air irigasi dengan baik, permasalahan-permasalahan yang akan timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengelola jaringan irigasi sangat terbatas.
- b) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) selama ini melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi di tingkat jaringan tersier dengan pola sederhana, yaitu mengatur pembagian air di tingkat kwarter.
- c) Dengan kewenangan mengelola jaringan irigasi mulai dari sumber air / bendung / pengambilan bebas sampai dengan jaringan tersier dalam satu kesatuan pengelolaan, maka Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) akan dihadapkan pada tingkat kompleksitas pengelolaan jaringan irigasi yang rumit.
- d) Telah terjadi degradasi sumber air dalam pengelolaan irigasi saat ini, yang mempengaruhi volume air yang dikelola, sehingga tingkat kesulitan pengaturan pembagian air akan semakin rumit.
- e) Pemerintah mempunyai keterbatasan keuangan dalam melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi, sehingga kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) meliputi juga pendanaan pengelolaan jaringan irigasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dapat dirumuskan menjadi 2 aspek utama yang akan berpengaruh pada saat Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola jaringan irigasi, yaitu:

- a). Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki, baik secara kualitas maupun kuantitas antara lain meliputi :
  - kecakapan personil dalam mengelola jaringan irigasi yang lebih kompleks mulai sumber air/pengambilan sampai dengan jaringan tersier.
  - kemampuan anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam menyediakan dana dalam mengelola jaringan irigasi yang lebih luas/besar.
- b) Kondisi jaringan irigasi yang akan dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai berikut :
  - jaringan irigasi dalam kondisi yang baik akan membantu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mengelola secara mudah dan murah.



- pengelolaan jaringan irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan mulai sumber air/pengambilan sampai dengan jaringan tersier, membutuhkan kecermatan dan prosedur yang tepat untuk membagi air secara adil dan berkecukupan.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja jaringan irigasi agar dapat secara tepat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sehingga air dapat disediakan dan didistribusikan sampai ke sawah, maka dibutuhkan berbagai aspek dan indikator yang saling mendukung. Oleh karena cakupan dan lingkup yang cukup luas tersebut maka didalam melakukan Kajian Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi, permasalahan yang akan dikaji dibatasi sebagai berikut :

- a) Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- b) Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi oleh P3A.

Kajian dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah *diserahkan kewenangan pengelolaan irigasinya (PPI) dari Bupati kepada P3A melalui SK Bupati dan Berita Acara*, yaitu : (DI) Krogowanan luas 715 ha Kabupaten Magelang dan DI Krisak luas 839 ha Kabupaten Wonogiri, dengan kriteria masing-masing DI adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.** Daftar Daerah Irigasi Kajian DI Krisak dan DI Krogowanan.

No.	Daerah Irigasi	Luas (ha)	Kabupaten	Sumber Air	Kondisi	SK Bupati PPI
1.	Krisak	839.00	Wonogiri	Waduk	Air Terbatas	SK Bupati Wonogiri Tertanggal 27 Juni 2000.
2.	Krogowanan	715.00	Magelang	Bendung	Air Cukup	SK Bupati Magelang No.188.4/425/Kep/6/2000 tgl. 20 Okt. 2000.

#### **1.4. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Mengetahui Status/Tingkat kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengelola jaringan irigasi dan Status/Tingkat kinerja jaringan irigasi yang dikelola Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- b) Membantu meningkatkan kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengelola jaringan irigasi, melalui kegiatan strategis yang dirumuskan (formulasi strategis) bagi lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengelola jaringan irigasi.

#### **1.5. Sistematika Penulisan.**

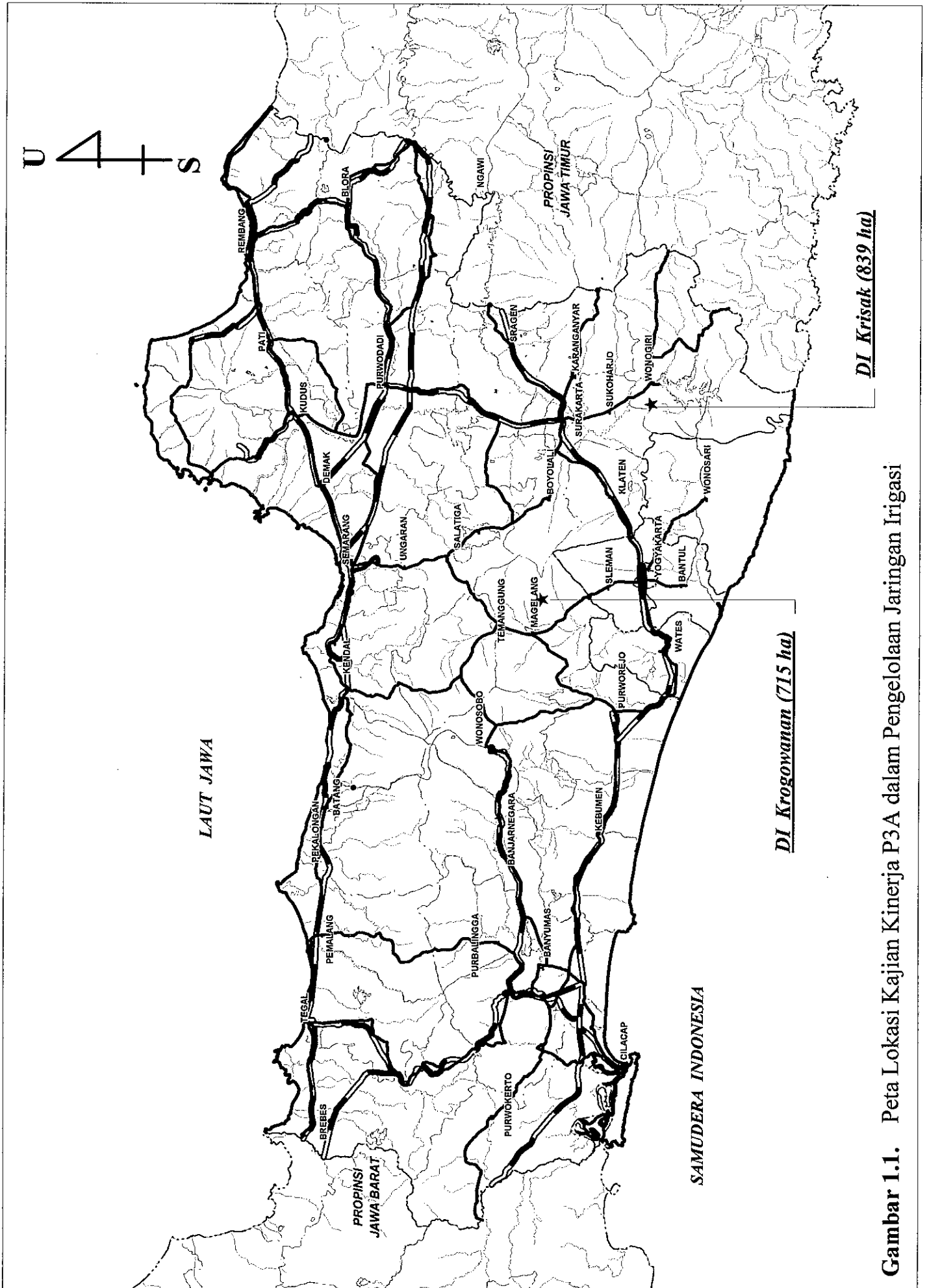
Tesis dengan judul Kajian Pengelolaan Jaringan Irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 : Menguraikan tentang latar belakang kebijakan Pemerintah tentang Irigasi yang baru, perumusan permasalahan, pembatasan masalah, tujuan diadakannya penelitian/kajian, serta sistematika penulisan Tesis.
- BAB 2 : Menguraikan Tinjauan Pustaka, tentang pengertian Kinerja dalam kajian ini, Kewenangan Pengelolaan Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, maksud Kajian Kinerja P3A dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi secara menyeluruh, Lembaga Pengelola Irigasi dan Landasan Hukum Pengelolaan Irigasi
- BAB 3 : Metode Penelitian menguraikan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi penelitian, Populasi P3A desa dan Gabungan P3A yang ada di lokasi penelitian, jumlah Sampel, Alat Ukur yang digunakan untuk menentukan

Tingkat Kinerja, Menyusun formulasi strategis dengan menggunakan metode SWOT.

**BAB 4** : Analisa dan Pembahasan menguraikan analisa terhadap data-data hasil penelitian (isian kuesioner), melakukan kajian dan bahasan tentang Hasil evaluasi Kinerja kelembagaan P3A dan Hasil evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi yang dikelola oleh P3A, menyusun Faktor Strategi Eksternal dan Internal berdasar hasil evaluasi kinerja P3A dan kinerja jaringan irigasi, kemudian menentukan Matrik Eksternal-Internal, kemudian menyusun Matrik SWOT dan dilanjutkan dengan membuat alternatif formulasi strategis.

**BAB 5** : Menguraikan Kesimpulan dan Saran dari hasil analisa dan formulasi strategis dengan metode SWOT, sehingga dapat disimpulkan dan disusun suatu saran yang membantu P3A dalam mengelola jaringan irigasi.



Gambar 1.1. Peta Lokasi Kajian Kinerja P3A dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

---

## BAB II.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Telaah Pustaka.

##### 2.1.1. Pengertian Kinerja.

Yang dimaksud dengan kinerja dalam topik tesis Kajian Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi, adalah sebagai berikut :

- a). hasil usaha atau kerja yang ditimbulkan akibat dari perlakuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam mengelola jaringan irigasi dan
- b). hasil kegiatan atau kerja yang ditunjukkan oleh jaringan irigasi akibat pengelolaan yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

##### 2.1.2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Yang dimaksud dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah *kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi. ( PP 77 tahun 2001 BAB I Ketentuan Umum Ps. 1 (15)).*

Dalam melaksanakan kewenangan yang diserahkan kepada P3A, maka yang dimaksud dengan :

- Gabungan P3A dibentuk oleh *beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada sekunder. (Kep.Men.Da.Gri. No. 50 Tahun 2001 BAB IV Tata Cara Pembentukan Ps. 8).*
- Induk P3A dibentuk oleh *beberapa GP3A atau P3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer. (Kep.Men.Da.Gri. No. 50 Tahun 2001 BAB IV Tata Cara Pembentukan Ps. 9).*

### 2.1.3. Pengelolaan Irigasi.

Yang dimaksud pengelolaan irigasi adalah *segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.*( PP 77/2001 BAB I Ketentuan Umum , ps 1 (21))

Lingkup pengelolaan irigasi tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Pemerintah (Dinas Pengairan) khususnya untuk jaringan utama (bangunan pengambilan, saluran induk, saluran sekunder dan bangunan-bangunan pelengkapanya) dalam melaksanakan kebijakan PP 23 tahun 1982 tentang Irigasi. Dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi, maka lingkup pengelolaan irigasi yang dikerjakan oleh P3A dan menjadi kajian dalam tesis ini adalah operasi dan pemeliharaan. Sedangkan pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi masih dibantu oleh Pemerintah (Dinas Pengairan).

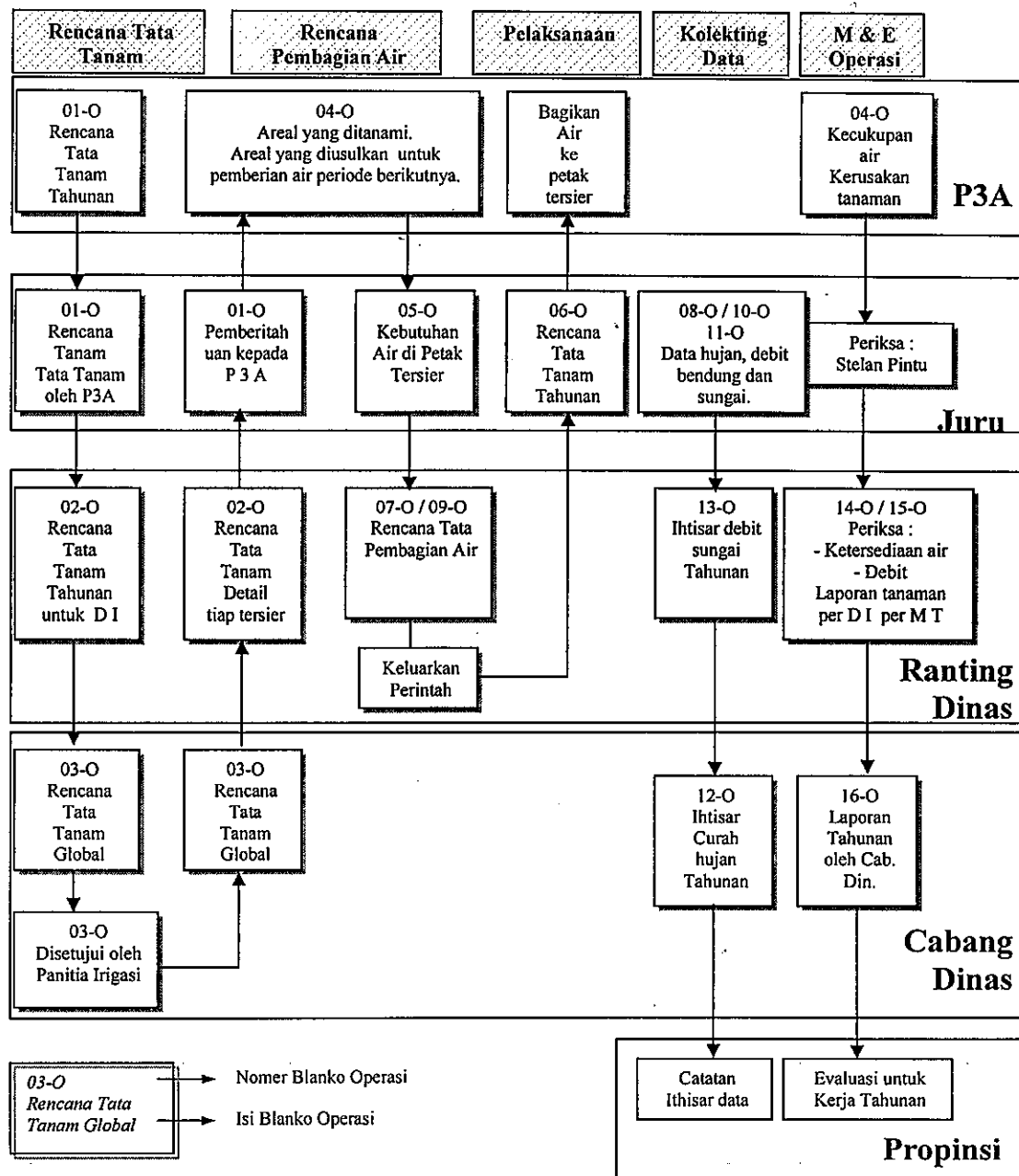
**Tabel 2.1. Jenis Kegiatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi.**

Jenis Kegiatan	PP 23 Tahun 1982	PP 77 Tahun 2001
1. Operasi	Pemerintah	P3A
2. Pemeliharaan	Pemerintah	P3A
3. Pengamanan	Pemerintah	P3A & Pemerintah
4. Rehabilitasi	Pemerintah	P3A & Pemerintah
5. Peningkatan JI	Pemerintah	P3A & Pemerintah

### 2.1.4. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan *operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi* adalah *kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.* ( PP 77/2001 BAB I Ketentuan Umum , ps 1 (22)).

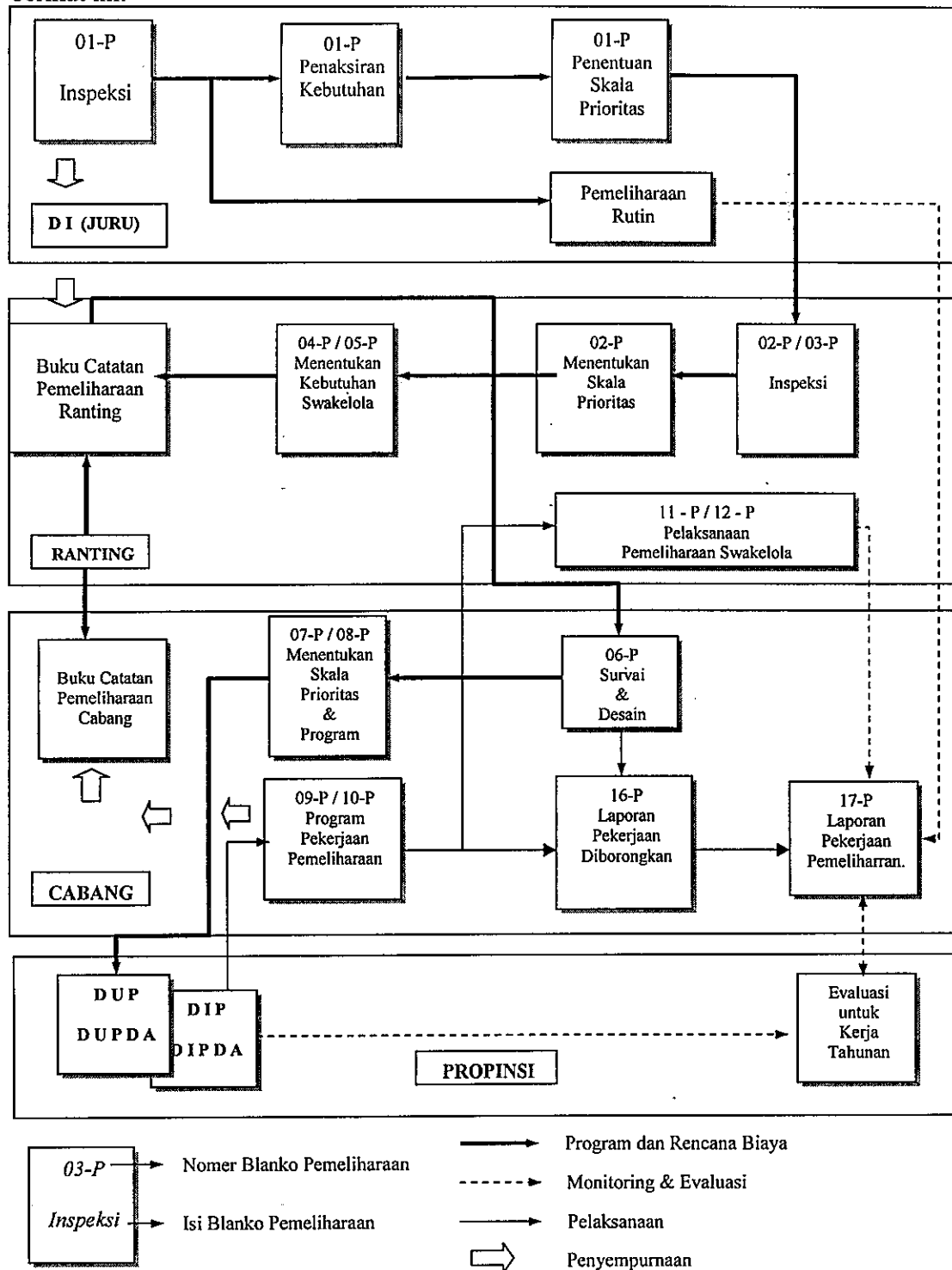
Kegiatan operasi dan pemeliharaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah (Dinas Pengairan) selama ini mengacu pada Prosedur Operasi dan Prosedur Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Prosedur Operasi jaringan irigasi secara sistematis dapat diperiksa pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Prosedur Operasi Jaringan Irigasi.



Prosedur Pemeliharaan jaringan irigasi secara sistematis dapat diperiksa pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2. Prosedur Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

### **2.1.5. Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi.**

Berdasarkan uraian kinerja, P3A, pengelolaan jaringan irigasi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut diatas, maka lingkup kajian kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

- a) Kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- b) Kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

## **2.2. Kewenangan pengelolaan irigasi.**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Seiring dengan itu telah dipersiapkan beberapa penyelenggaraan Pemerintahan dan kewenangan lain ikut pula dilimpahkan kepada Daerah, salah satunya adalah pengelolaan Irigasi.

### **2.2.1. Pengelolaan Irigasi oleh Kabupaten/Kota.**

Sesuai dengan *Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2)* menyebutkan '*Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi antara lain Pekerjaan Umum*'. Sedangkan pengelolaan irigasi merupakan bagian dari Pekerjaan Umum, dengan demikian pengelolaan irigasi menjadi kewenangan wajib Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan wajib Daerah Kabupaten/Kota adalah

daerah irigasi mulai sumber air atau bangunan pengambilan sampai dengan areal oncoran terletak pada 1 wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.2.2. Pengelolaan Irigasi oleh Provinsi.**

Untuk lebih jelasnya dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan irigasi di tingkat Propinsi, menyebutkan '*kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dibidang Pekerjaan Umum .. (d) penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dari bangunan sadap*'. (Peraturan Pemerintah 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pasal 3 ayat (5))

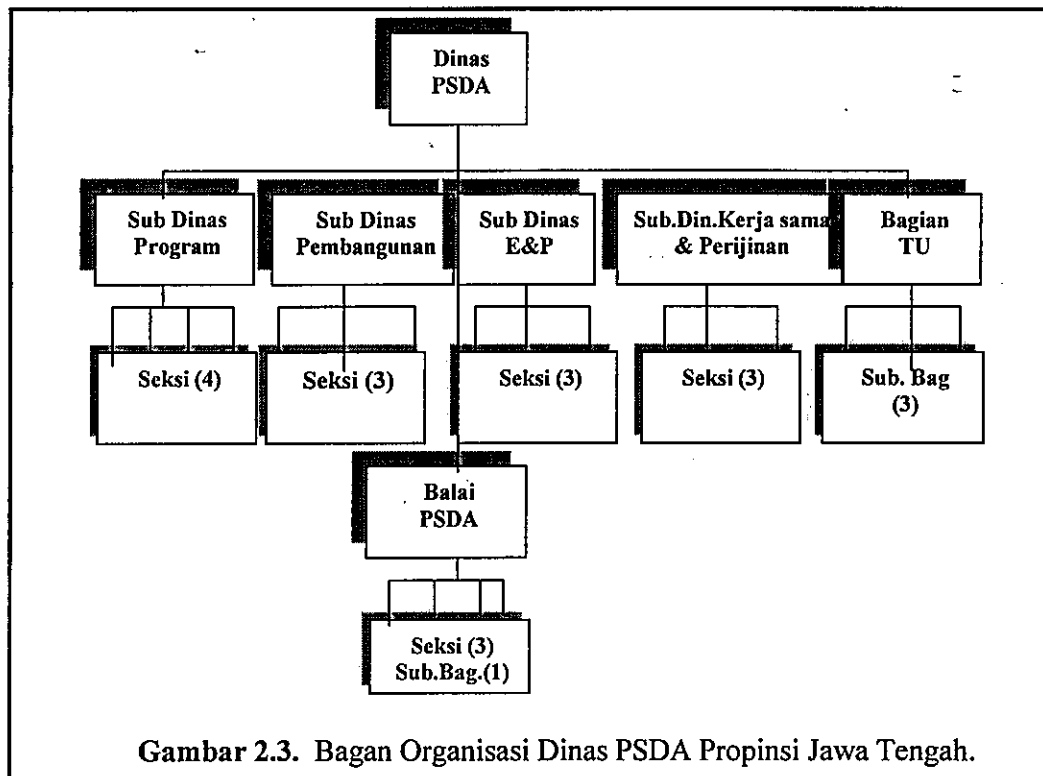
### **2.3. Lembaga Pengelola Irigasi (LPI).**

*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi (LPI) Propinsi dan Kabupaten/Kota, pada pasal 5 dijelaskan bahwa LPI terdiri dari P3A, Dinas yang membidangi irigasi, dinas yang membidangi pertanian, komisi irigasi, dan lembaga koordinasi yang membidangi irigasi. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menindaklanjuti PP 77 / 2001 tentang Irigasi. Sampai dengan akhir Oktober 2003, 29 Kabupaten dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan Perda tentang Irigasi, 9 Kabupaten telah ditetapkan oleh DPRD termasuk Kabupaten Magelang dan Wonogiri, sisanya sedang diajukan ke DPRPD untuk segera dibahas dan disahkan.*

Selanjutnya diuraikan lembaga pengelola irigasi yang erat kaitannya dengan kajian P3A dalam pengelolaan irigasi secara berurutan.

### 2.3.1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terhadap kewenangan pengelolaan irigasi (UU 11 / 1974, UU 22 / 199 dan PP 77 / 2001), patut dicermati kelembagaan Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan melalui *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah* dengan Bagan Organisasi Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah seperti berikut ini :



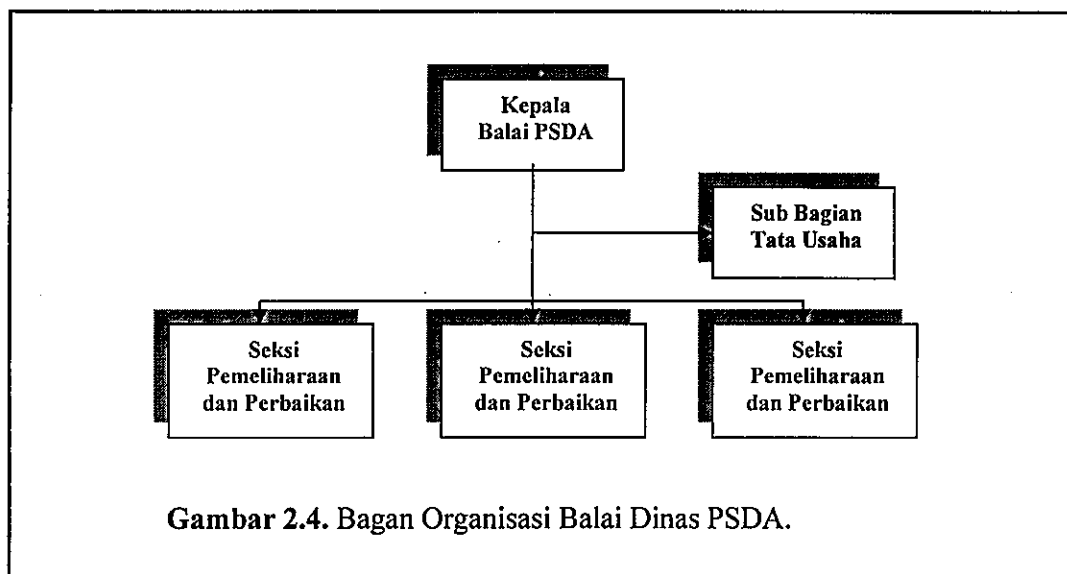
### 2.3.2. Unit Pelaksana Teknis (Balai) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas PSDA dan kebijakan teknis operasional bidang PSDA, maka telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas PSDA

melalui *Paeraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Dinas PSDA*, sebagai berikut :

- Balai PSDA Pemali Comal.
- Balai PSDA Jragung Tuntang.
- Balai PSDA Serang Lusi Juana.
- Balai PSDA Bengawan Solo.
- Balai PSDA Progo Bowonto Luk Ulo.
- Balai PSDA Serayu Citanduy.

Sehubungan dengan kewenangan pengelolaan irigasi lintas Kabupaten, maka keberadaan Balai PSDA sangatlah strategis. Untuk itu perlu dicermati juga Bagan Organisasi Balai PSDA seperti gambar berikut ini :

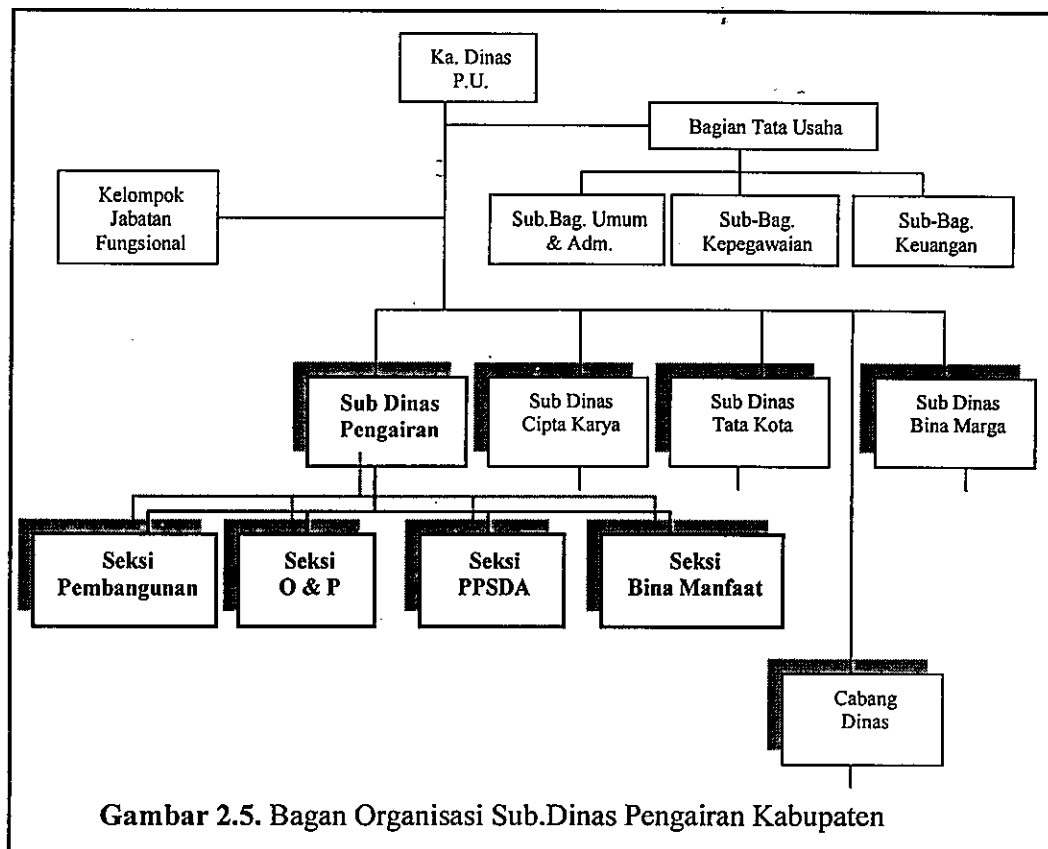


**Gambar 2.4.** Bagan Organisasi Balai Dinas PSDA.

### **2.3.3. Dinas/Sub Dinas Pengairan di Kabupaten Magelang dan Wonogiri.**

Sesuai dengan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Wonogiri di bidang pengelolaan irigasi utamanya daerah irigasi yang berada dalam masing-masing Kabupaten, maka keberadaan Sub Dinas Pengairan

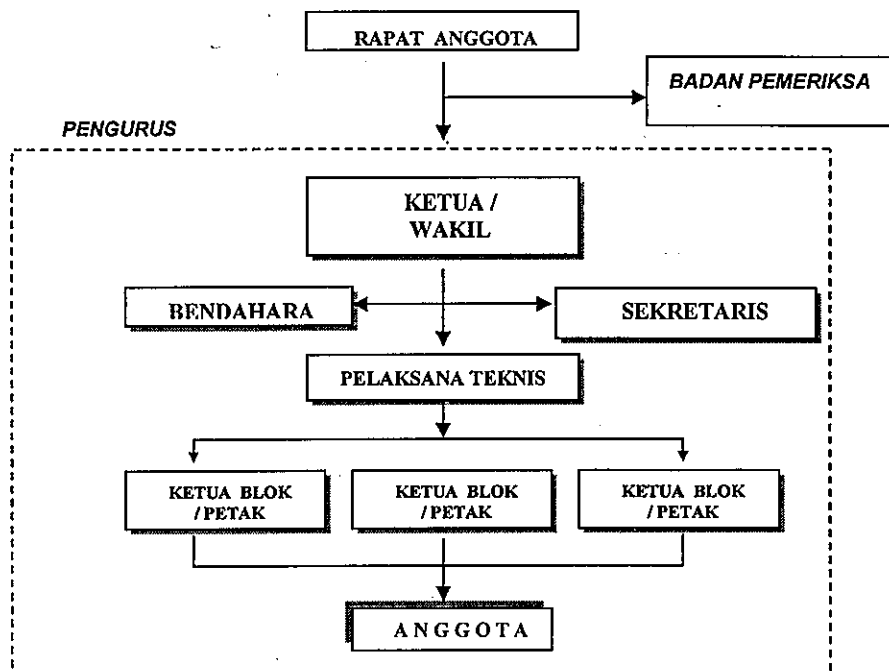
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang dan Wonogiri yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat Bagan Organisasi berikut ini :



#### 2.3.4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat Desa.

Menurut PP 77 / 2001 tentang Irigasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 50 / 2001 tentang Pemberdayaan P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal

*pengelola irigasi. Secara umum lembaga P3A di Kabupaten Magelang dan Wonogiri dibentuk pada daerah pengelolaan irigasi di tingkat Desa yang pada saat itu mengacu pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 411.6/97/1993 tentang Petunjuk Pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Selama kebijakan yang berkaitan dengan lembaga P3A tidak saling bertentangan, maka P3A Desa yang sudah terbentuk tersebut dapat dipertahankan, dengan bagan organisasi seperti berikut ini :*



**Gambar 2.6.** Bagan Organisasi P3A Desa di Kabupaten Magelang dan Wonogiri

**2.3.4.1. P3A Desa Daerah Irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang.**

Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta telah terbentuk berdasarkan wilayah kerja administrasi desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dibuat dan telah disetujui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati Magelang pada tahun 1998. Berikut adalah daftar legalisasi P3A Dharma Tirta pada daerah irigasi Krogowanan :

**Tabel 2.2. Daftar P3A Desa di Daerah Irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang.**

No.	Nama P3A	Desa	Kecamatan	Nomor AD/ART	No. & Bdn. Hkm.
1.	Bina Tirta	Krogowanan	Sawangan	611/4531/05/1998	98/1998 24 Des.1998
2.	Sawang Sari	Sawangan	Sawangan	611/4531/05/1998	94/1998 24 Des.1998
3.	Gondo Sari	Gondowangi	Sawangan	611/4531/05/1998	93/1998 24 Des.1998
4.	Sumber Makmur	Pager Sari	Mungkid	611/4531/05/1998	98/1998 24 Des.1998
5.	Adem Ayem	Mungkid	Mungkid	611/4531/05/1998	99/1998 24 Des.1998
6.	Sejahtera	Ambar Tawang	Mungkid	611/4531/05/1998	100/1998 24 Des.1998
7.	Tirto Makmur	Blondo	Mungkid	611/4531/05/1998	101/1998 24 Des.1998
8.	Ngudi Makmur	Bumirejo	Mungkid	611/4531/05/1998	102/1998 24 Des.1998

**2.3.4.2. P3A Desa Daerah Irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri.**

Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta telah terbentuk berdasarkan wilayah kerja administrasi desa. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dibuat dan telah disetujui oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati Wonogiri pada tahun 1998.

Berikut adalah daftar legalisasi P3A Dharma Tirta pada daerah irigasi Krisak :

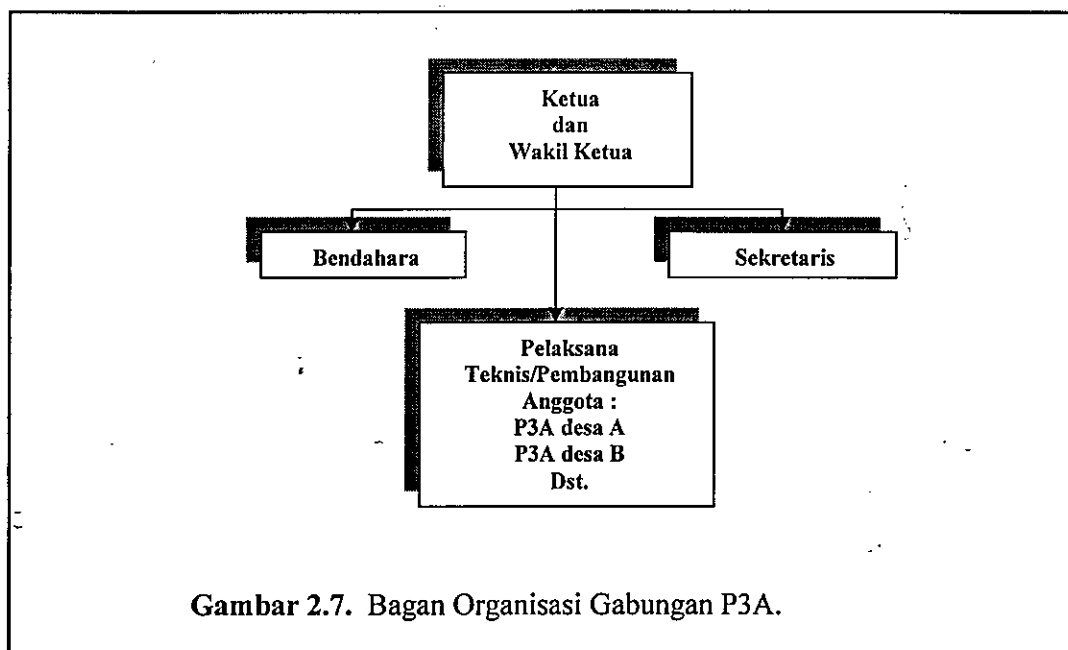


**Tabel.2.3.** Daftar P3A Desa di Daerah Irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri

No.	Nama P3A	Desa	Kecamatan	Tanggal AD/ART	Nomer Pengesahan AD/ART
1.	Krido Makmur	Singodutan	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
2.	Ngudi Makmur	Kaliancar	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
3.	Sari Bumi	Gemantar	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
4.	Tri Mulyo	Sendang Ijo	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
5.	Ngudi Mulyo	Nambangan	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
6.	Sarono Mulyo	Jendi	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99
7.	Tirto Makmur	Pule	Selogiri	1 Februari 1998	611/01/56/99

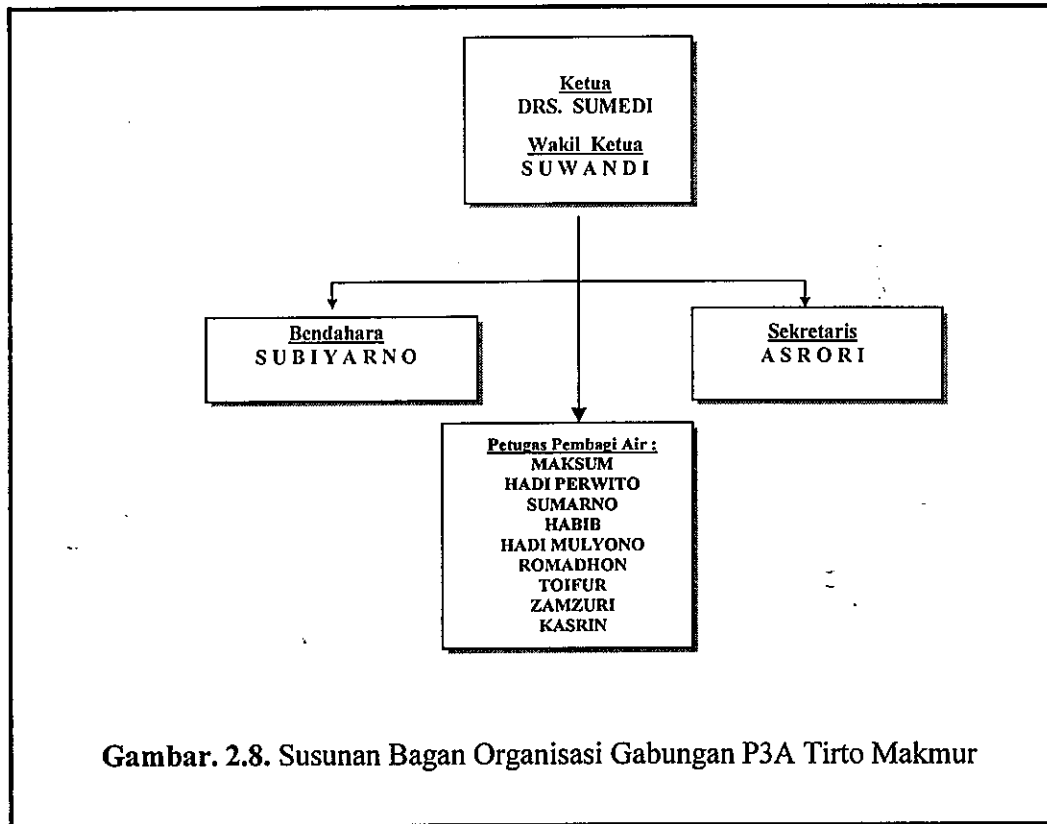
### 2.3.5. Gabungan / Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Gabungan P3A di DI Krisak dan DI Krogowanan dibentuk pada tahun 1998, dimana pedoman pemberdayaan P3A tersebut diatas belum ditetapkan. Sehingga Gabungan P3A yang dibentuk adalah gabungan beberapa P3A Desa didalam satu wilayah daerah irigasi (satu kesatuan pengelolaan), belum mempertimbangkan GP3A tingkat sekunder karena luas areal yang tidak terlalu besar. Dibentuk GP3A karena didalam *PP 77 / 2001 tentang Irigasi pasal 9 ayat (1)* menyebutkan, '*Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.*' Adapun bagan organisasi Gabungan P3A yang telah dibentuk seperti gambar berikut ini :



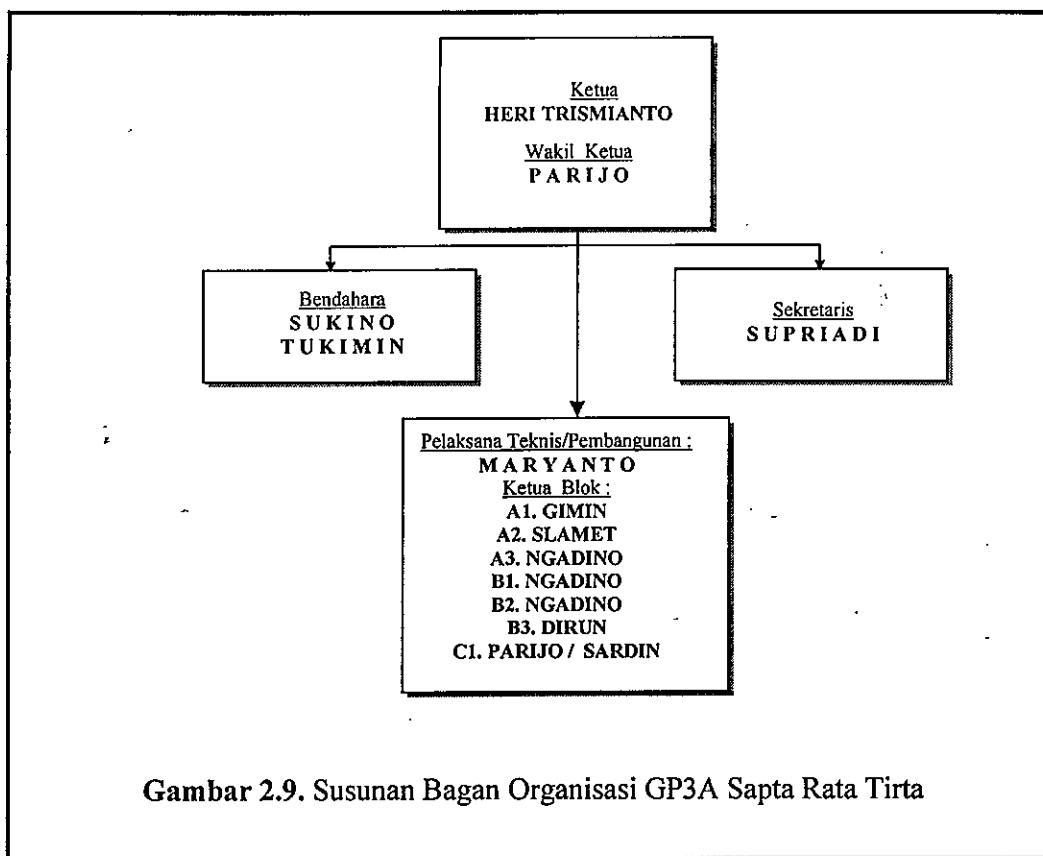
#### 2.3.5.1. Gabungan P3A se wilayah DI Krogowanan.

Untuk melaksanakan program Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI), maka P3A membentuk lembaga Gabungan P3A di tingkat induk atau se wilayah DI Krogowanan untuk mengelola jaringan irigasi di tingkat jaringan utama (sekunder dan primer) bila wewenang pengelolaan irigasi diserahkan. Pengurus Gabungan P3A terdiri atas unsur-unsur P3A Desa yang telah ada. Gabungan P3A DI Krogowanan diberi nama Tirta Makmur, dan pembentukannya disahkan dengan akte Notaris No. 22 pada tanggal 23 Maret 1999 di Magelang. . *Susunan Bagan Organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Tirta Makmur DI. Krogowanan* dapat diperiksa pada gambar berikut :



#### 2.3.5.2. Gabungan P3A se wilayah DI Krisak.

Untuk melaksanakan program Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI), maka P3A membentuk lembaga Gabungan P3A di tingkat induk atau se wilayah DI Krisak untuk mengelola jaringan irigasi di tingkat jaringan utama (sekunder dan primer) bila wewenang pengelolaan irigasi diserahkan. Pengurus Gabungan P3A terdiri atas unsur-unsur P3A Desa yang telah ada. Gabungan P3A DI Krisak diberi nama Sapta Rata Tirta dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998, dan disahkan dengan akte Notaris No. 7 pada tanggal 25 Maret 1999 di Wonogiri. *Susunan Bagan Organisasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Sapta Rata Tirta* DI. Krisak dapat diperiksa pada gambar berikut :



#### 2.4. Landasan Hukum Pengelolaan Irigasi.

Pengelolaan Irigasi selama ini dikelola berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Instruksi-instruksi Menteri yang berkaitan sebagai landasan hukum secara operasional.

##### 2.4.1. Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Pengelolaan jaringan irigasi atau bangunan pengairan pada umumnya adalah bagian dari suatu usaha untuk menata dan mengatur air, sebagaimana yang tertuang pada :

*Pasal 1 : 'usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat'.*

Pemanfaatan atas air guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat juga terkandung maksud usaha-usaha efisiensi terhadap pemanfaatan air itu sendiri.

*'Guna menjamin kelestarian fungsi dari jaringan irigasi serta bangunan-bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan serta perbaikan-perbaikan bangunan-bangunan pengairan'.*

Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi antara lain meliputi kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan.

#### **2.4.2. Peraturan Pemerintah Nomer 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.**

Pemerintah kemudian melakukan tata pengaturan air didalam melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan seperti yang tertuang pada :

*Pasal 6 : 'bagi bangunan pengairan yang penguasaannya berada pada Pemerintah Daerah, eksploitasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan bagi bangunan pengairan yang penguasaannya berada pada Pemerintah Pusat, eksploitasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat'.*

#### **2.4.3. Peraturan Pemerintah Nomer 23 tahun 1982 tentang Irigasi.**

Pelaksanaan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Tugas dan tanggung jawab kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan tertuang pada:

*Pasal 28 : 'eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap nya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima*

*puluh) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah'.*

**2.4.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).**

Pada tanggal 8 Nopember tahun 1989 Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pelaksanaan Penyerahan Irigasi Kecil (PIK) kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diperuntukkan pada daerah irigasi (DI) dengan luas < 500 ha. Pemerintah mengharapkan bahwa pelaksanaan Penyerahan Irigasi Kecil (PIK) oleh pemerintah diharapkan dapat menciptakan kemandirian bagi petani untuk mengelola daerah irigasinya. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup PIK pada *PERMEN PU No.42/PRT/1989 pasal 3*, yaitu ;

*'Penyerahan asset jaringan irigasi kecil berupa bangunan dan saluran yang dibangun / diperbaiki oleh Pemerintah. Penyerahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kecil yang tercatat dalam Buku Pintar Daerah Irigasi PU, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan operasi bendung / pengambilan bebas yang dilakukan oleh P3A, tetap dalam pengamatan, pengendalian dan pengawasan instansi pemerintah yang berwenang'.*

Dengan demikian P3A akan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset jaringan irigasi yang telah menjadi wewenangnya.

**2.4.5. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1999 tentang PKPI.**

Pada tanggal 26 April 1999 Pemerintah menerbitkan kebijaksanaan di bidang pengelolaan irigasi melalui Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia Nomor 3

tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Butir-butir kebijakan yang tertuang di dalam INPRES No.3/1999, secara garis besar berisi antara lain :

- a) Redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, dengan memberikan peran serta kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- b) Pemberdayaan petani pemakai air melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- c) Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) secara bertahap, selektif dan demokratis.
- d) Mekanisme pendanaan O&P irigasi, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi.
- e) Keberlanjutan jaringan irigasi tetap terjaga.

#### **2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi.**

Pada bulan Desember 2001 Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pembaharuan irigasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi. Peran serta dan keterlibatan P3A dalam mengelola jaringan irigasi semakin jelas. Berikut bab ataupun pasal yang sangat berkaitan dengan keterlibatan P3A dalam mengelola jaringan irigasi;

Bab II Prinsip-prinsip Pengelolaan Irigasi, pasal 4 (1) : *Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.*

**Bab VIII Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, pasal 31 (1) :** *P3A memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.*

Agar pelaksanaan kebijakan PP 77 / 2001 tentang irigasi berjalan dengan baik sesuai tujuan pembaharuan pengelolaan irigasi, maka dari 5 kebijakan pokok yang diinstruksikan dalam INPRES 3 / 1999 tentang PKPI, Pemerintah telah menetapkan 4 Keputusan Menteri terkait yang sifatnya pedoman agar PP 77 / 2001 tentang irigasi secara operasional dapat dilaksanakan, meliputi :

KEBIJAKAN POKOK	KEPUTUSAN MENTERI	PEDOMAN TENTANG
1. Redefinisi Tugas LPI	- Kepmen.DaGri. No. 22 / 2003	- Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab LPI Propinsi & Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan P3A	- Kepmen.DaGri. No. 50 / 2001	- Pemberdayaan P3A.
3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi. (PPI)	- Kepmen.Kimpraswil No. 529 /KPTS/ M/2001	- Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A.
4. Pendanaan Irigasi	- Kepmen. Keuangan No. 298 /KMK.02 / 2003	- Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.
5. Keberlanjutan Irigasi	- ( <i>Belum terbit</i> )	- ( <i>Belum terbit</i> )

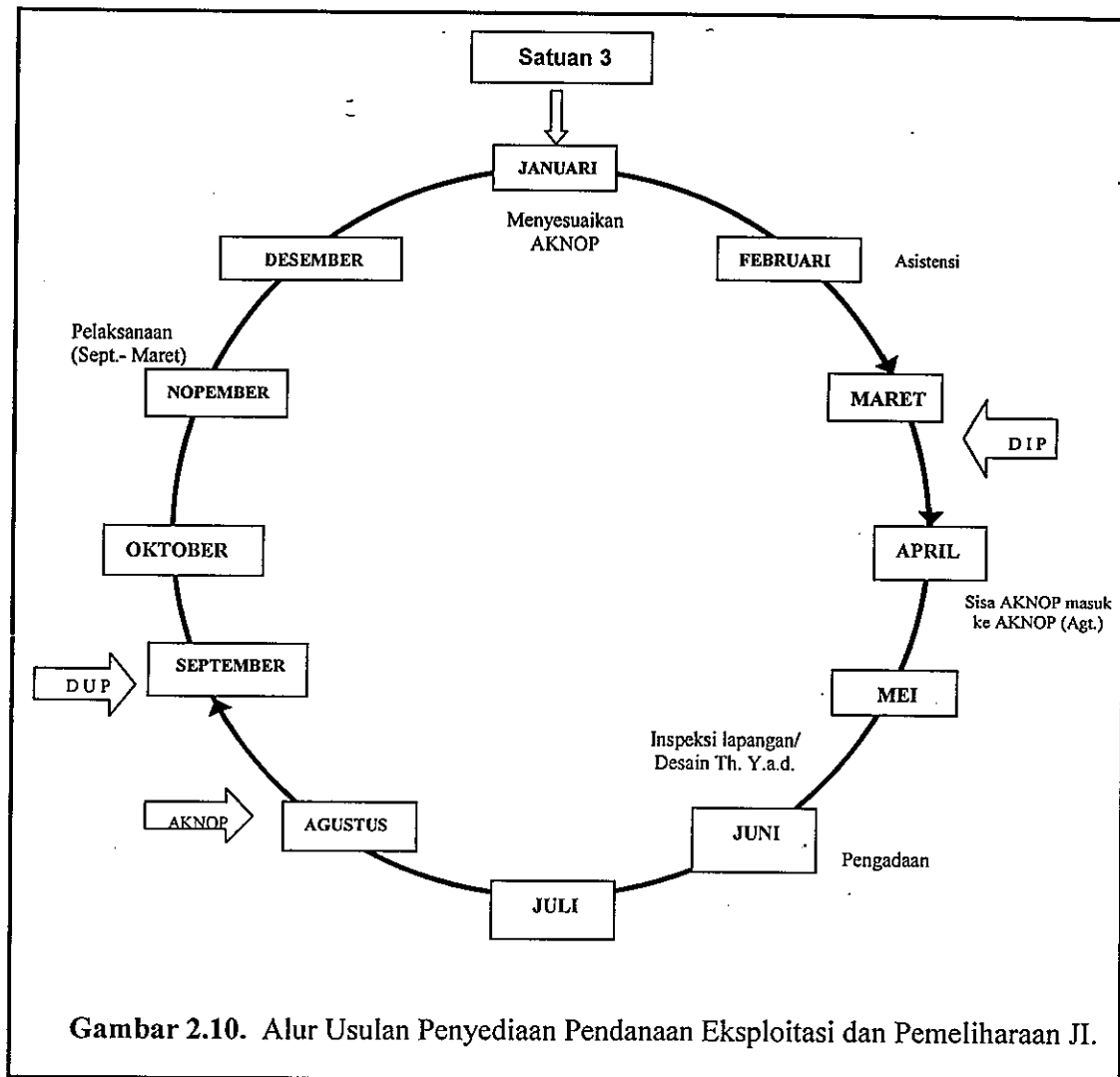
#### **2.4.7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.**

Pemerintah sesuai dengan tanggungjawabnya akan menyediakan dana eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Karena dana yang dibutuhkan cukup besar, maka pemanfaat langsung air irigasi dari hasil pembangunan prasarana pengairan dapat membantu penyediaan dana eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui iuran. Hal tersebut sesuai dengan *Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan*, pasal 2 ayat (1) menyebutkan '*Iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan*



meliputi .. (1) dana yang ditarik sebagai imbalan dari pemanfaat langsung dari tersedianya air sebagai hasil pembangunan prasarana pengairan, sebagai hasil pengelolaan Perusahaan, Badan Hukum, Badan Sosial ataupun perseorangan .....

Pendanaan jaringan irigasi oleh Pemerintah secara rutin diawali dengan serangkaian pengisian blanko Pemeliharaan hingga dapat mengestimasi kebutuhan nyata daerah irigasi. Mekanisme usulan penyediaan pendanaan eksploitasi dan pemeliharaan irigasi dapat diperiksa pada gambar berikut :



**2.4.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR).**

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang Penyerahan Irigasi Kecil (PIK), pada tanggal 29 Juni tahun 1992 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PER.MEN.DA.GRI) Nomor 6 tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) untuk daerah irigasi dengan luas > 500 ha.

Kebijakan IPAIR mempunyai filosofi bahwa iuran ditetapkan oleh petani dan hasil yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk kepentingan petani kembali. Sehingga dana O&P jaringan irigasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah akan terbantu oleh IPAIR. Petani akan merencanakan tata tanam yang diinginkan sesuai dengan ketersediaan air yang ada, sehingga IPAIR dapat terkumpul setiap akhir masa tanam. Keadilan didalam membagi air sesuai dengan ketersediaan air yang ada mewujudkan rencana tata tanam yang baik adalah merupakan konsep dasar pemberlakuan IPAIR. Karena IPAIR bersifat membantu pemerintah dalam pendanaan O&P Irigasi, maka tarif IPAIR masih mempertimbangkan subsidi pemerintah dalam pembiayaan dana O&P Irigasi.

Untuk lebih operasionalnya pungutan IPAIR di Propinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Propinsi DATI I Jawa Tengah nomor 4 tahun 1994 tentang Iuran Pelayanan Irigasi di Propinsi DATI I Jawa Tengah. Berikut adalah Rekapitulasi realisasi pungutan IPAIR di Jawa Tengah.

**Tabel 2.4.** Rekapitulasi Realisasi IPAIR Propinsi Jawa Tengah 1990/91-1998/99.

No.	T A H U N	Luas Areal ( ha )	Target IPAIR ( Rp. )	Realisasi Pungutan ( Rp. )	%
1	1990/91	955.00	11,541,175.00	5,990,297.00	51.90
2	1991/92	11,042.00	133,442,570.00	64,955,452.00	48.68
3	1992/93	35,192.00	370,671,769.00	198,429,543.00	53.53
4	1993/94	68,303.00	568,519,901.00	174,195,079.00	30.64
5	1994/95	98,367.00	1,431,619,390.00	689,579,960.00	48.17
6	1995/96	152,725.00	1,531,081,640.00	731,040,440.00	47.75
7	1996/97	172,824.00	1,882,966,510.00	772,558,130.00	41.03
8	1997/98*	202,154.00	1,721,376,504.00	534,562,166.00	31.05
9	1998/99**	181,941.00	1,880,048,996.00	476,311,871.00	25.34

*Catatan :* \* = Data diambil pada akhir bulan Desember 1997.

\*\* = Data diambil pada akhir bulan Mei 1999.

Sumber data : Sub-Dinas O & P Irigasi Dinas Pengairan Jawa Tengah.

#### **2.4.9. Surat Edaran Diraktorat Jenderal Pemerintah Urusan Otonomi Daerah Nomer No.611/3002/PUOD tahun 1998 tentang Pembaharuan Pelaksanaan IPAIR dengan Pola Baru (Pemberdayaan P3A).**

Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi, diperlukan biaya O&P yang memadai pada masa yang lalu menjadi tanggung jawab Pemerintah dan cenderung menjadi beban permanen terhadap alokasi sumber dana. Karena itu Pemerintah menetapkan program Iuran Pelayanan Irigasi yaitu iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah. Dana IPAIR itu dulu dipungut oleh P3A dan disetorkan ke Kas Daerah.

Sesuai surat edaran dari Direktorat Jenderal PUOD Nomor 611/3002/PUOD tanggal 14 September 1998 tentang Pelaksanaan Program IPAIR, telah dilakukan langkah-langkah yang tepat yaitu IPAIR dipungut dari, oleh dan untuk P3A/Gabungan P3A yang digunakan untuk biaya O & P di wilayah kerja P3A/Gabungan P3A untuk seluruh jaringan yang wewenang pengelolaannya menjadi tanggung jawabnya.

#### 2.4.10. Peraturan Pemerintah nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah yang tertuang didalam PP 77 / 2001 tentang Irigasi utamanya pada BAB VIII Pembiayaan, Menteri Keuangan melalui Surat Keputusannya nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota, telah menguraikan secara sistematis Penyediaan dana pengelolaan irigasi sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah masih mempunyai sarana dan prasarana yang menjadi miliknya dan P3A melakukan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi.

**Tabel. 2.5. Tanggungjawab Pengelolaan Irigasi dari Tahun ke Tahun.**

		1974 - 1982		1982 - 1989		1989 - 1999		1999 - .....	
		Jar. Utm.	Tersier	Jar. Utm.	Tersier	Jar. Utm.	Tersier	Jar. Utm.	Tersier
Pemerintah	A < 500 Ha	v	v	v	-	-	-	-	-
	A > 500 Ha	v	v	v	-	v	-	-	-
I/G/P3A	A < 500 Ha	-	-	-	v	v	v	v	v
	A > 500 Ha	-	-	-	v	-	v	v	v
Land. Hkm		UU 11/74		UU 11/74 PP 23/82		- UU 11/74 - IPAIR - PP 23/82 PerMen.PU 42/PRT/89		- UU SDA - PP 77/01 - IPAIR oleh P3A	

#### 2.5. Kerangka Perencanaan Strategis.

P3A mengelola jaringan irigasi utamanya pada tingkat jaringan irigasi utama untuk daerah irigasi dengan luasan lebih besar (>) 500 Ha, harus dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu lembaga P3A harus dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga lembaga P3A tersebut dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternalnya.

Perencanaan strategis yang dapat ditempuh oleh lembaga P3A dalam mengelola jaringan irigasi adalah mempersiapkan secara matang rencana jangka panjangnya. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi sehingga sesuai dengan misi, sasaran serta kebijakan lembaga P3A. (*Freddy Rangkuti, Analisis SWOT, 1999*)

## **2.6. Hipotesa**

- a). Ada pengaruh kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terhadap pengelolaan jaringan irigasi.
- b). Kinerja jaringan irigasi yang dikelola mempengaruhi kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- c). Ada hubungan antara aspek-aspek yang ada pada kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan aspek-aspek yang ada pada kinerja jaringan irigasi, sehingga jaringan irigasi yang baik akan dengan mudah dikelola oleh kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

---

## **BAB III.**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian.**

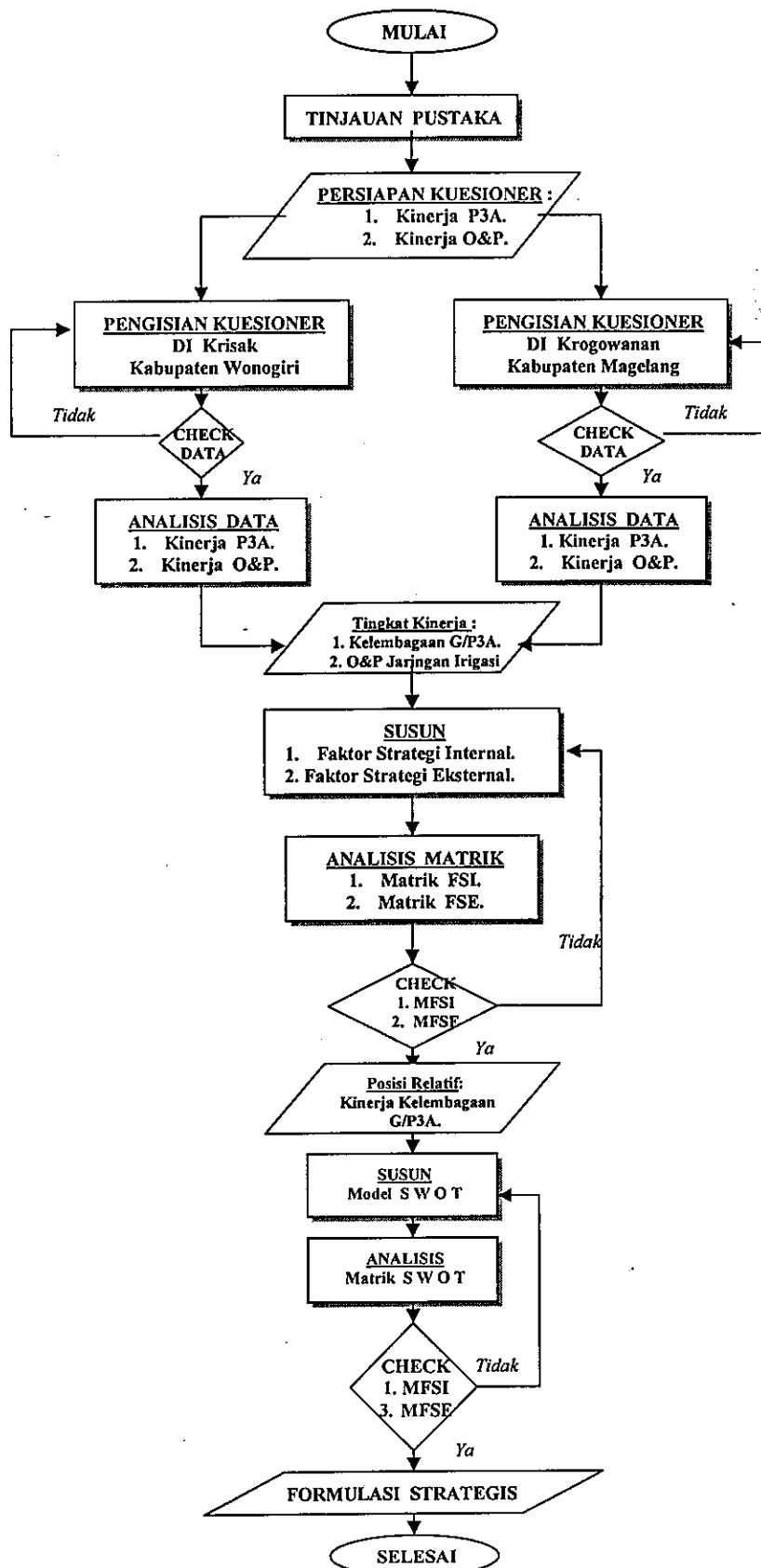
Kajian kinerja P3A dalam pengelolaan irigasi merupakan bentuk penelitian tentang aspek lingkungan sosial suatu lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dilaksanakan pada studi kasus (*case study*) yang meliputi interaktif antara sekelompok orang, lingkungan hidup dan jaringan irigasi yang ada, sehingga dapat menggambarkan kondisi dan kejadian yang ada. ( "S. Nasution, *Metode Research*, 2000 ).

##### **3.1.1. Lingkup Penelitian.**

Studi kasus di daerah irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri dan daerah irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang mempunyai lingkup penelitian yang secara utama dibagi menjadi 2 kinerja pokok yaitu meliputi :

- a) Kajian kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- b) Kajian kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

Bagan alir kajian kinerja P3A dalam pengelolaan irigasi dapat diperiksa seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1. Bagan Alir Kajian Kinerja P3A dalam Pengelolaan Irigasi



Masing-masing penelitian terhadap dua (2) kajian kinerja tersebut akan dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pengurus P3A Desa ataupun Gabungan P3A setempat tentang kinerja lembaga/organisasi P3A dan jaringan irigasi yang telah dikelolanya.

### **3.1.2. Lokasi.**

Lokasi penelitian kajian kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi dilakukan di daerah irigasi (DI) Krogowanan Kabupaten Magelang dan DI krisak Kabupaten Wonogiri.

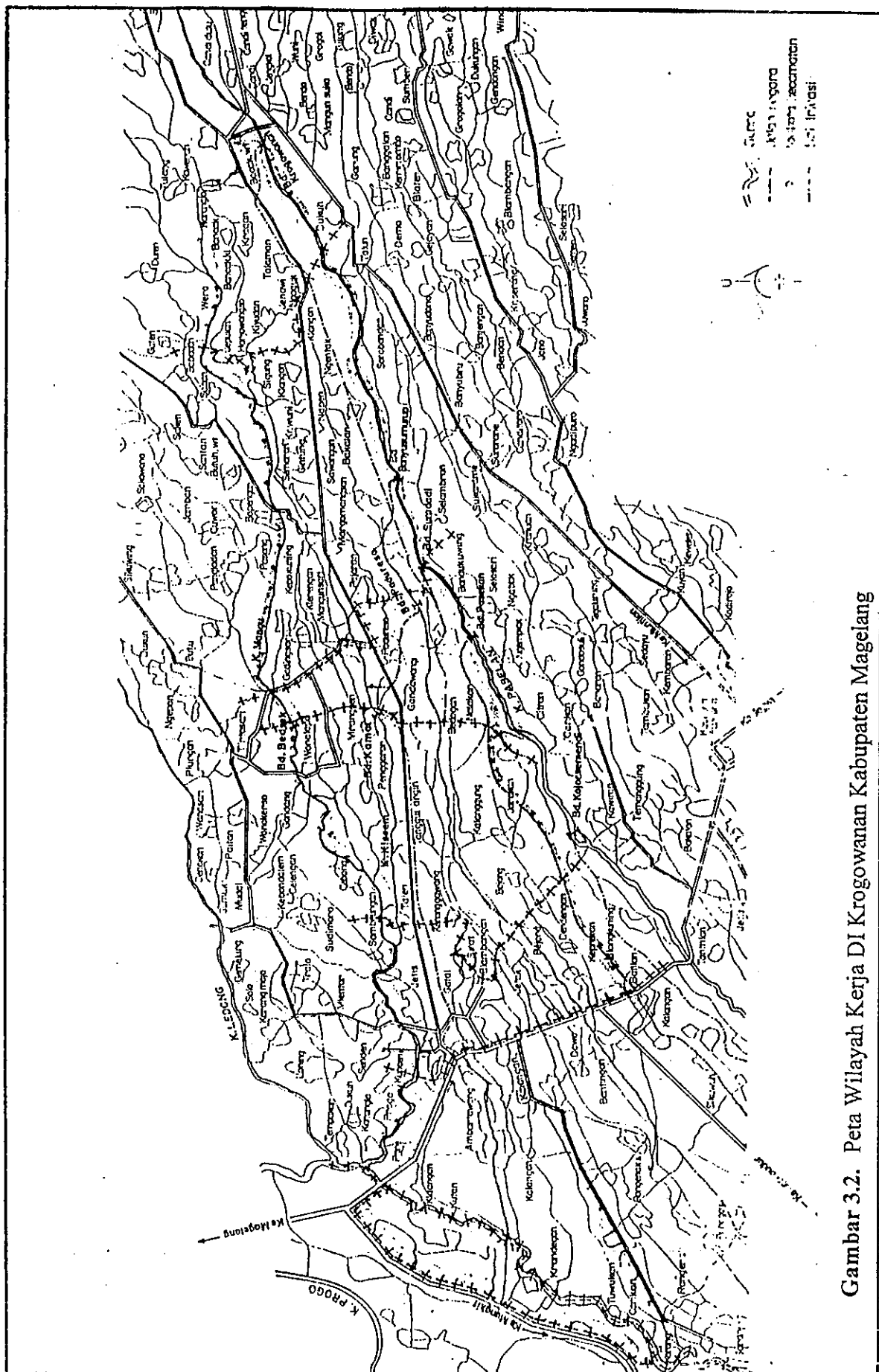
#### **3.1.2.1. Lokasi Daerah Irigasi Krogowanan Kabupaten Magelang.**

Daerah Irigasi Krogowanan terletak di Kabupaten Magelang, secara geografis terletak di daerah pegunungan (di lereng G. Merapi) merupakan daerah irigasi dengan kategori kecukupan air, sepanjang musim air tersedia cukup banyak.

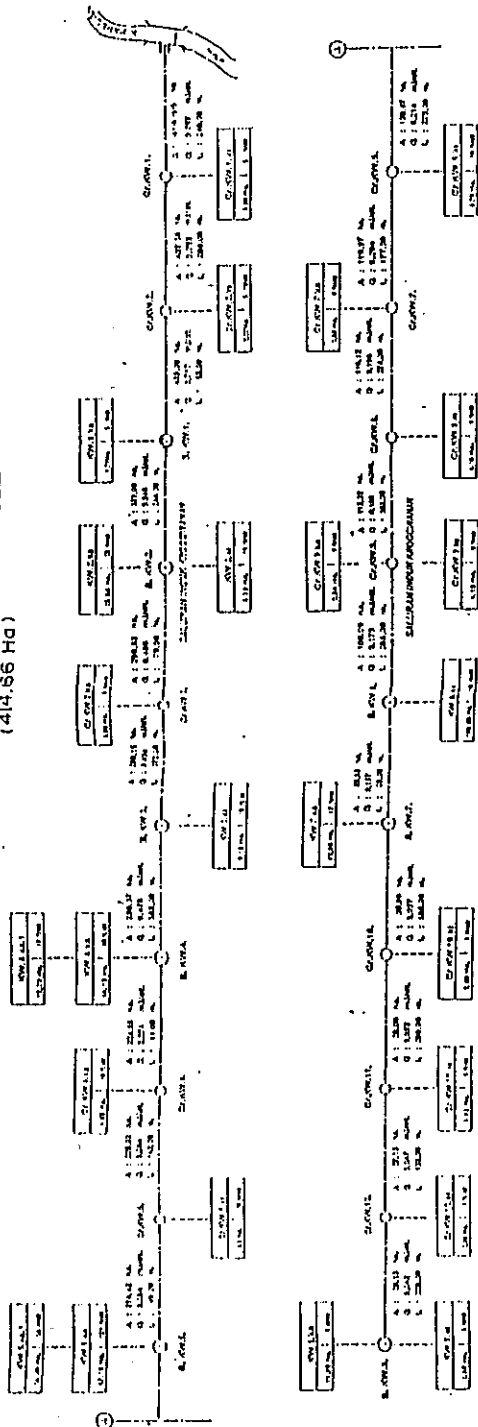
Daerah Irigasi Krogowanan merupakan daerah irigasi di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Magelang. Sumber air didapat dari intake bangunan utama dari Sungai Pabelan. Bangunan utama memanfaatkan bangunan check dam yang dibangun oleh Proyek Merapi, masuk didalam wilayah administrasi Dukuh Lumut (Karangrejo) Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Lokasi bangunan utama (bendung Krogowanan) dan areal oncorannya dapat dicapai melalui transportasi darat, terletak di Selatan kota Magelang melalui jalan Propinsi kearah Jogjakarta sejauh 10 km terdapat desa Blabak, kemudian belok ke arah kiri jurusan Sawangan – Boyolali, sejauh 12 km (kiri dan kanan jalan adalah areal oncoran DI Krogowanan) dari Blabak terletak desa Sawangan dimana lokasi bangunan utama (bendung Krogowanan) terletak di sungai Pabelan. Saluran induk Krogowanan sepanjang 530.00m dan sekunder Krogowanan sepanjang 24,609.00 m mengoncori areal seluas

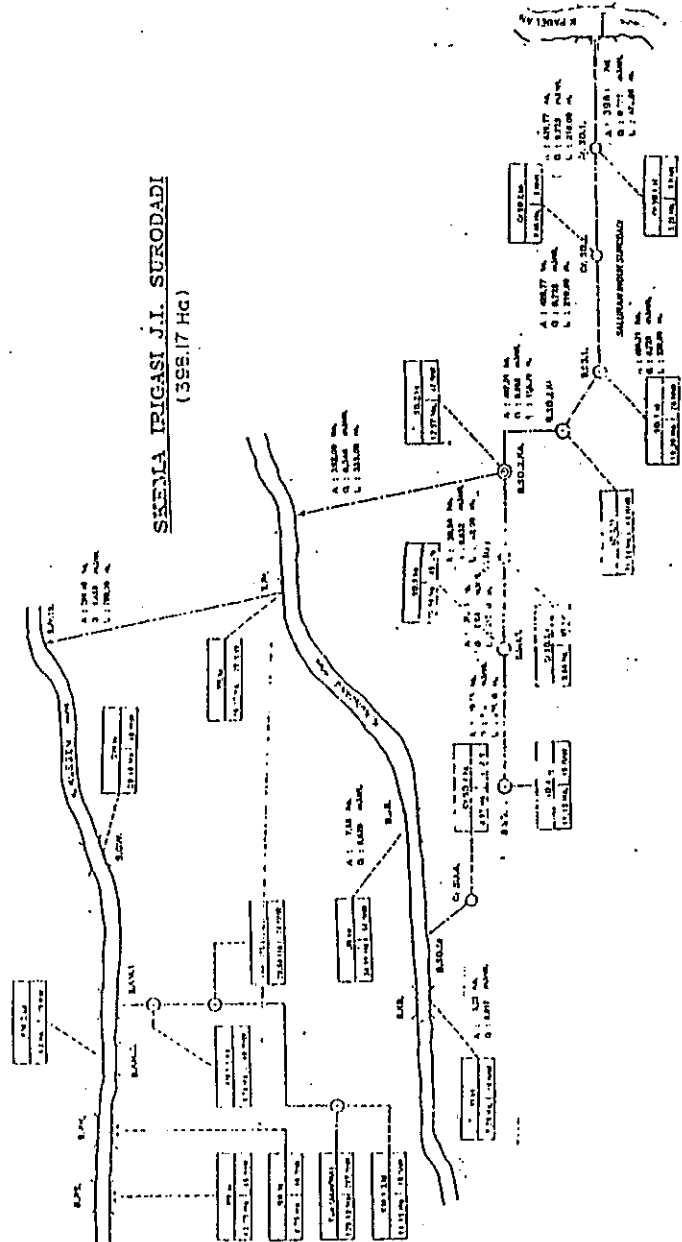
414.66 ha. Saluran induk Surodadi sepanjang 790.00 m dan sekunder Surodadi sepanjang 2,660.00 m mengoncori areal seluas 398.17 ha.



**SKEMA IRIGASI J.L. KROGOWANAN**  
(414,86 Ha)



**SKEMA IRIGASI J.L. SURODADI**  
(399,17 Ha)



Gambar 3.3. Skema Irigasi DI Krogowan Kabupaten Magelang

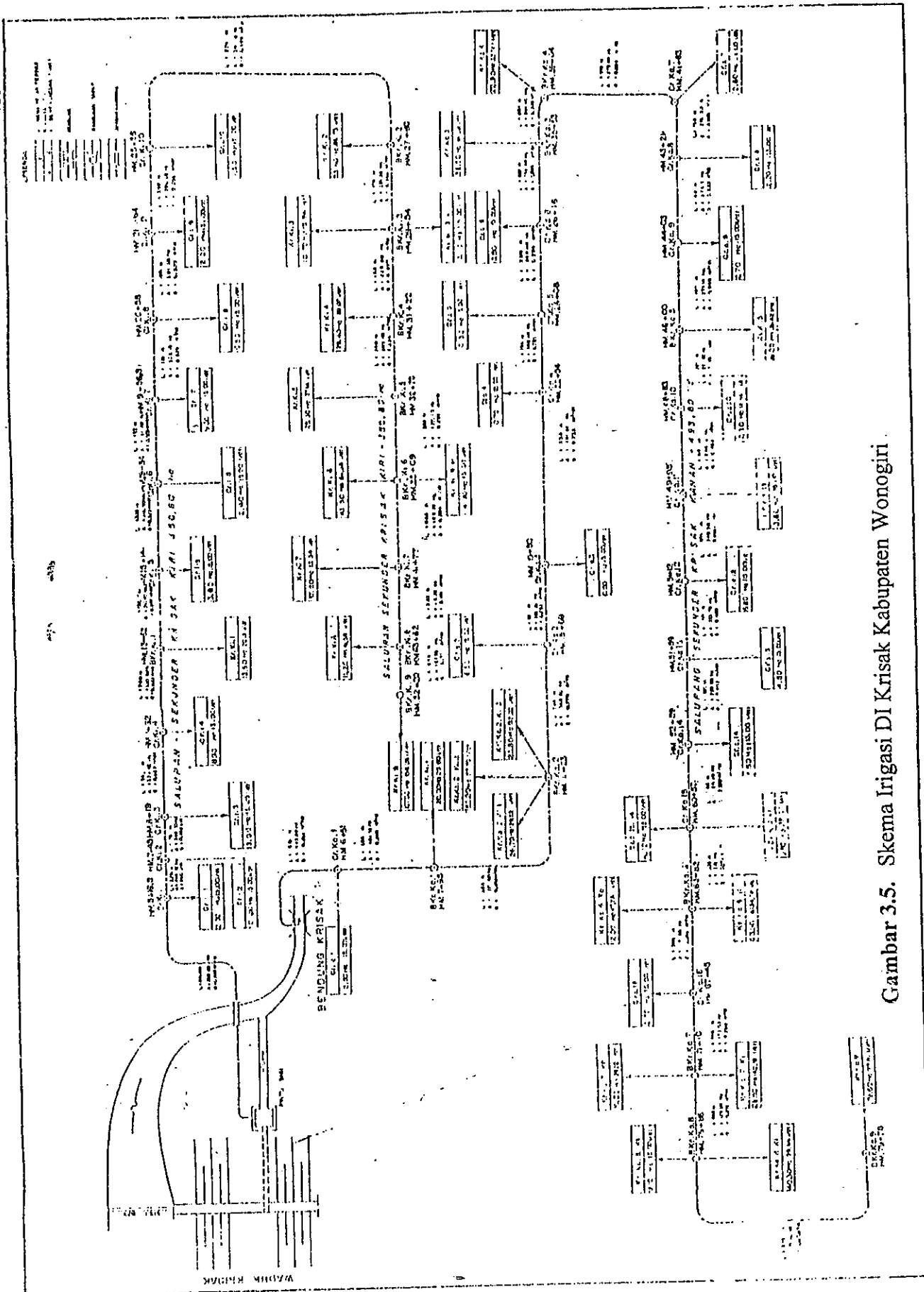
**3.1.2.2. Lokasi Daerah Irigasi Krisak Kabupaten Wonogiri.**

Daerah Irigasi Krisak terletak di Kabupaten Wonogiri, secara geografis terletak di daerah perbukitan tandus, merupakan daerah irigasi dengan kategori kekurangan air, yang mengandalkan air dari waduk Krisak dan debit Sungai Bengawan Solo.

Lokasi waduk Krisak dan areal oncorannya dapat dicapai melalui transportasi darat, terletak di Selatan kota Surakarta melalui jalan Propinsi kearah Wonogiri sejauh 24 km. Lokasi waduk relatif mendekati kota Wonogiri, sebelum memasuki kota belok kearah kanan sekitar 1 km dari jalan tersebut terletak waduk Krisak. Tepatnya di desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Daerah Irigasi Krisak merupakan daerah irigasi di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sumber air didapat dari waduk Krisak, setelah keluar dari outlet debit air waduk Krisak mengalir melalui gorong-gorong mengoncori Krisak Kiri seluas 350.80 ha dan debit air yang mengalir tidak melewati gorong-gorong akan ditangkap oleh sebuah bendung. Melalui bangunan pengambilan yang ada di bendung air kemudian mengoncori Krisak Kanan seluas 493.80 ha, total air waduk tersebut dapat mengoncori areal seluas 844.60 ha.





Gambar 3.5. Skema Irigasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri.

### **3.1.3. Populasi.**

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh kelembagaan P3A desa/petak/unit ataupun jumlah Gabungan P3A yang telah terbentuk dalam satu daerah irigasi yang dikaji.

#### **3.1.3.1. Populasi DI Krogowanan Kabupaten Magelang.**

Populasi kelembagaan P3A yang telah terbentuk di DI Krogowanan Kabupaten Magelang adalah sejumlah 8 P3A desa. Sedangkan populasi Gabungan P3A yang telah terbentuk berdasarkan gabungan kelembagaan P3A-P3A desa adalah sejumlah 1 Gabungan P3A. Rincian populasi GP3A dan P3A desa DI Krogowanan Kabupaten Magelang selanjutnya dapat diperiksa pada tabel berikut.

#### **3.1.3.2. Populasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri.**

Populasi kelembagaan P3A yang telah terbentuk di DI Krisak Kabupaten Wonogiri adalah sejumlah 7 P3A desa. Sedangkan populasi Gabungan P3A yang telah terbentuk berdasarkan gabungan kelembagaan P3A-P3A desa adalah sejumlah 1 Gabungan P3A. Rincian populasi GP3A dan P3A desa DI Krisak Kabupaten Wonogiri selanjutnya dapat diperiksa pada tabel berikut.

### **3.1.4. Sampel.**

Sampel penelitian yang dimaksud adalah apabila jumlah populasi terlampaui banyak, maka diambil sejumlah sample yang representative, yaitu yang mewakili keseluruhan populasi itu. ( *S. Nasution, Metode Research, 2000* )

Dari populasi yang ada di DI Krisak dan Krogowanan menunjukkan bahwa jumlah sample yang diambil sama dengan jumlah populasi yang ada.



**3.1.4.1. Sampel DI Krogowanan Kabupaten Magelang.**

Jumlah sample yang mewakili populasi yang ada di daerah irigasi (DI) Krogowanan Kabupaten Magelang yaitu untuk kinerja kelembagaan P3A desa/petak/unit sejumlah 8 sampel dan Gabungan P3A sejumlah 1 sampel atau sama dengan jumlah populasi yang ada, sedangkan untuk kinerja jaringan irigasi sejumlah 1 sampel atau sama dengan jumlah daerah irigasi yang ada. Rincian sample dapat dilihat pada tabel berikut.

**3.1.4.2. Sampel DI Krisak Kabupaten Wonogiri.**

Jumlah sample yang mewakili populasi yang ada di daerah irigasi (DI) Krisak Kabupaten Wonogiri yaitu untuk kinerja kelembagaan P3A desa/petak/unit sejumlah 7 sampel dan Gabungan P3A sejumlah 1 sampel atau sama dengan jumlah populasi yang ada, sedangkan untuk kinerja jaringan irigasi sejumlah 1 sampel atau sama dengan jumlah daerah irigasi yang ada. Rincian sample dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.** Lokasi, Populasi GP3A/P3A dan Sampel DI Krogowanan.

Jenis Kegiatan / Lokasi	Populasi GP3A / P3A	Sampel	Catatan
Kinerja Kelembagaan P3A DI Krogowanan Kab. Magelang	1. Bina Tirta	1	
	2. Sawang Sari	1	
	3. Gondo Sari	1	
	4. Sumber Makmur	1	
	5. Adem Ayem	1	
	6. Sejahtera	1	
	7. Tirta Makmur	1	
	8. Ngudi Makmur	1	
	9. GP3A Tirta Makmur	1	
Kinerja Jaringan Irigasi	Jaringan Utama	1	
	Jaringan Tersier	8	

**Tabel 3.2.** Lokasi, Populasi G/P3A dan Sampel DI Krisak.

Jenis Kegiatan / Lokasi	Populasi GP3A / P3A	Sampel	Catatan
Kinerja Kelembagaan P3A DI Krisak Kab. Wonogiri	1. Krido Makmur	1	
	2. Ngudi Makmur	1	
	3. Sari Bumi	1	
	4. Tri Mulyo	1	
	5. Ngudi Mulyo	1	
	6. Saroni Mulyo	1	
	7. Tirta Makmur	1	
	8. GP3A Rata Sapta Tirta	1	
Kinerja Jaringan Irigasi	Jaringan Utama	1	
	Jaringan Tersier	7	

### 3.2. Alat Ukur.

Dalam penelitian ini memerlukan dibutuhkan pengukuran variabel-variabel. Hasil pengukuran variabel-variabel tersebut didominasi dengan hasil-hasil yang bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui hal-hal yang bersifat kuantitatif pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan jawaban-jawaban yang langsung dinilai dengan angka-angka, sehingga dapat diolah dengan Statistik. Pengukuran kuantitatif memungkinkan penelitian menguji hipotesis dan menguji teori yang mendasarinya. (S. Nasution, *Metode Research*, 2000).

#### 3.2.1. Mengukur Tingkat Kinerja.

Didalam penelitian ini untuk menilai setiap jawaban pertanyaan yang ada digunakan pengukuran dengan *skala Likert*. Dimana setiap jawaban yang telah dipersiapkan akan diberi nilai 1 angka apabila jawaban '*tidak memuaskan/buruk/jelek*', 2 angka untuk jawaban '*ragu-ragu/tidak terlalu buruk/tidak terlalu jelek*', 3 angka untuk jawaban '*cukup memuaskan*' dan 4 angka untuk jawaban '*sangat memuaskan*'.

Tingkat Kinerja dibutuhkan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan aspek-aspek yang menjadi pantauan, sehingga formulasi strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan G/P3A dan kinerja jaringan irigasi dapat disusun secara baik. Tingkat kinerja dapat dinilai sesuai dengan jumlah seluruh nilai setiap kuesioner dengan tahapan sebagai berikut :

Tahapan Nilai	Prosentase Nilai	Tingkat Kinerja	Notasi
0 - 20	0 % - 25 %	Tidak Baik	TB
21 - 40	26 % - 50 %	Kurang Baik	KB
41 - 60	51 % - 75 %	Cukup Baik	CB
61 - 80	76 % - 100 %	Sangat Baik	SB

**3.2.1.1. Mengukur kinerja kelembagaan P3A dan GP3A.**

**- Aspek-aspek kinerja kelembagaan G/P3A.**

Kinerja kelembagaan P3A dan GP3A dalam mengelola jaringan irigasi ditentukan oleh aspek yang paling dominan mempengaruhi kelembagaan P3A dan GP3A dalam menjalankan lembaga pengelola/pemakai air irigasi tersebut (periksa kembali uraian BAB 2 Tinjauan Pustaka). Aspek yang paling dominan mempengaruhi kinerja kelembagaan P3A ataupun GP3A adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Organisasi. (terdiri dari 4 pertanyaan/pantauan detail)
- b. Aspek Penggunaan/Pemanfaatan Air Irigasi. (terdiri dari 3 pertanyaan/pantauan detail)
- c. Aspek Pemeliharaan Jaringan Irigasi. (terdiri dari 3 pertanyaan/pantauan detail)
- d. Aspek Keuangan. (terdiri dari 4 pertanyaan/pantauan detail)
- e. Aspek Kondisi Fisik Jaringan Irigasi. (terdiri dari 3 pertanyaan/pantauan detail)
- f. Aspek Pembinaan G/P3A oleh Pemerintah. (terdiri dari 3 pertanyaan/pantauan detail)

Rincian kuesioner yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan dengan rincian aspek sebagai berikut :

**I. Aspek Organisasi.**

**1.1. Kepengurusan Organisasi P3A.**

Pemantauan dilakukan terhadap status keberadaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di tingkat desa/petak hingga pembentukan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) di tingkat sekunder/Kecamatan serta pembentukan Federasi/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (F/IP3A) di tingkat induk bangunan utama atau sewilayah daerah irigasi.

**1.2. Pemahaman anggota atau pengurus P3A terhadap AD/ART.**

Pemantauan dilakukan terhadap anggota dan pengurus P3A akan pemahaman dan pengertian AD/ART yang telah dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota.

**2. Tingkat antusias dan respon anggota P3A terhadap rapat Tahunan P3A.**

Pemantauan dilakukan apakah rapat tahunan P3A pernah diadakan serta seberapa besar peserta/anggota P3A yang hadir pada saat rapat tersebut diadakan.

**3. Frekwensi Rapat Pengurus.**

Pemantauan dilakukan terhadap frekwensi dan berapa kali rapat pengurus diadakan dalam satu musim tanam.

**II. Aspek Penggunaan / Pemanfaatan Air.**

**1. Pola dan Rencana/ Realisasi Tata Tanam.**

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan P3A dalam merencanakan pola tata tanam serta realisasinya.

**2. Rencana dan Realisasi Pembagian Air.**

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan P3A dalam merencanakan pembagian air dan realisasinya.

**3. Pertemuan dengan Mantri Pengairan.**

Pemantauan dilakukan terhadap frekwensi P3A mengadakan pertemuan secara rutin dengan Mantri Pengairan atau petugas Pengairan yang lain.

**III. Aspek Pemeliharaan Jaringan.**

**1. Program Kerja Operasi dan Pemeliharaan**

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan P3A didalam menyusun program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah menjadi tanggung jawabnya.

**2. Realisasi Pelaksanaan Program Kerja O & P**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi program kerja P3A terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah menjadi tanggung jawabnya.

**3. Rencana Perbaikan dan Pengembangan Jaringan.**

Pemantauan dilakukan terhadap rencana program P3A terhadap perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah menjadi tanggung jawabnya.

**IV. Aspek Keuangan.**

**1. Realisasi Iuran anggota P3A**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi anggota P3A dalam membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD/ART.

**2.1. Realisasi Penggunaan Dana hasil Iuran.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi pengurus P3A dalam menggunakan dana hasil iuran sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD/ART atau program kerja yang telah disepakati.

**2.2. Administrasi Keuangan.**

Pemantauan dilakukan terhadap tertib administrasi pengurus P3A dalam mencatat setiap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam AD/ART.

**3. Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus P3A.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi Laporan pertanggung-jawaban dari pengurus G/P3A.

**V. Aspek Kondisi Fisik Jaringan.**

1. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi fisik bangunan-bangunan yang ada di jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah diserahkan kepada G/P3A.

2. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi fisik saluran yang ada di jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah diserahkan kepada G/P3A.

3. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi fisik fasilitas penunjang yang ada di jaringan irigasi yang wewenang pengelolaannya telah diserahkan kepada G/P3A.

**VI. Pembinaan G/P3A oleh Pemerintah.**

**1. Pembinaan Teknis.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi perhatian Pemerintah (yang terkoordinasi dalam Kelompok Pembina Lapangan / KPL) dalam membina organisasi G/P3A.

**2. Kebutuhan dan Pemenuhan Bantuan Teknis.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi perhatian Pemerintah terhadap permintaan bantuan secara teknis yang diajukan oleh organisasi G/P3A.

**3. Kebutuhan dan Pemenuhan Bantuan Fisik.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi perhatian Pemerintah terhadap permintaan bantuan fisik yang diajukan oleh organisasi G/P3A.

**- Kriteria Penilaian.**

Mengukur kinerja kelembagaan P3A dan GP3A digunakan skala pengukuran sikap pengurus/anggota lembaga P3A atau GP3A terhadap lembaga yang mengatur (mengelola) air irigasi dengan cara responden memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kriteria penilaian adalah antara 1 sampai 4, dimana nilai 1 diberikan untuk jawaban terburuk/terjelek, nilai 2 diberikan untuk jawaban kurang baik, nilai 3 diberikan untuk jawaban cukup baik, nilai 4 diberikan untuk jawaban paling baik.

**Tabel 3.3. Kriteria Penilaian Kinerja Kelembagaan G/P3A.**

Aspek	Jumlah Pertanyaan	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Jumlah Maksimal
1. Organisasi	4	4	16	16
2. Penggunaan / Pemanfaatan Air	3	3	12	12
3. Pemeliharaan JI	3	3	12	12
4. Keuangan	4	4	16	16
5. Kondisi Fisik JI	3	3	12	12
6. Pembinaan oleh Pemerintah	3	3	12	12
Jumlah	20	20	80	80

Status tingkat kinerja lembaga G/P3A didapat dengan menjumlahkan seluruh nilai aspek yang terpantau. Tingkat kinerja dapat dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu :

- Bila jumlah nilai berkisar 0 – 20 : Tidak baik.
- Bila jumlah nilai berkisar 21 – 40 : Kurang baik.
- Bila jumlah nilai berkisar 41 – 60 : Cukup baik.
- Bila jumlah nilai berkisar 61 – 80 : Sangat baik.

#### **3.2.1.2. Mengukur kinerja jaringan irigasi.**

##### **- Aspek-aspek kinerja jaringan irigasi.**

Kinerja jaringan irigasi ditentukan oleh aspek yang paling dominan mempengaruhi jaringan irigasi tersebut (periksa kembali uraian BAB 2 Tinjauan Pustaka).

Aspek yang paling dominan mempengaruhi kinerja jaringan irigasi adalah:

- a. Aspek Fisik mencakup Pemeliharaan. (terdiri dari 5 pertanyaan/pantauan detail)
- b. Aspek Pengembangan G/P3A di bidang Irigasi. (terdiri dari 5 pertanyaan/pantauan detail)



- c. Aspek Pengelolaan Air. (terdiri dari 4 pertanyaan/pantauan detail)
- d. Aspek Pengembangan Pertanian. (terdiri dari 6 pertanyaan/pantauan detail)

Rincian kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan detail sebagai berikut :

**A. Kondisi Fisik Mencakup Pemeliharaan.**

- 1. **Persentase jumlah personil GP3A yang rutin membantu O&P Jaringan Irigasi.**

Pemantauan dilakukan terhadap jumlah personil GP3A yang telah secara rutin melakukan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi, sebagai pengganti tugas personil Pemerintah (Dinas Pengairan Kabupaten).

- 2. **Persentase dana Pemeliharaan dibanding kebutuhan, bersumber dari dana P3A tiap tahun.**

Pemantauan dilakukan terhadap kemampuan GP3A dalam mengumpulkan Iuran Pengelolaan Irigasi dalam 1 DI yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan jaringan irigasi.

- 3. **Persentase dana Pemeliharaan dibanding kebutuhan, bersumber dari dana lain (APBD Propinsi, Kabupaten atau sumber lain) dalam 1 tahun.**

Pemantauan dilakukan terhadap tanggungjawab Pemerintah Kabupaten pada pengelolaan jaringan irigasi yang kewenangan pengelolaannya menjadi tanggungjawabnya.

- 4. **Persentase bangunan ukur yang masih berfungsi.**

Pemantau dilakukan terhadap jumlah bangunan ukur yang masih berfungsi dari keseluruhan jumlah bangunan ukur yang ada dalam 1 wilayah daerah irigasi tersebut.

- 5. **Persentase banyaknya pintu air yang masih berfungsi.**

Pemantau dilakukan terhadap jumlah pintu air yang masih berfungsi dari keseluruhan jumlah pintu air yang ada dalam 1 wilayah daerah irigasi tersebut

**B. Pengembangan GP3A di bidang Irigasi.**

**1. Kewenangan GP3A mengelola Jaringan Irigasi.**

Pemantauan dilakukan atas kesesuaian Surat Keputusan Bupati dan Berita Acara Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada GP3A. GP3A mempunyai wewenang mengelola jaringan irigasi mulai dari bendung atau dari saluran primer atau dari saluran sekunder ataupun dari pintu sadap.

**2. Apakah P3A telah membuat rencana O&P jaringan irigasi.**

Untuk mengelola jaringan irigasi, apakah GP3A telah membuat rencana O&P jaringan irigasi dan rencana tersebut untuk 1 daerah irigasi atau untuk saluran sekunder kebawah atau jaringan tersier.

**3. Aktifitas rutin GP3A dan P3A dalam mengelola jaringan irigasi**

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh GP3A dan P3A selama mengelola jaringan irigasi, apakah dimulai dari bendung hingga tersier atau dimulai dari saluran primer atau dimulai dari saluran sekunder atau hanya di tingkat tersier saja.

**4. Apabila terjadi kerusakan mendadak, apa yang diupayakan oleh GP3A**

Melakukan gotong-royong dilokasi kerusakan atau menaksir jumlah kerusakan dan mengadakan iuran spontan atau mengusulkan bantuan kepada Dinas Pengairan atau mengajukan usulan perbaikan ke Bupati (Pemda).

**5. Pembinaan dari Dinas yang membidangi irigasi**

Pemantauan dilakukan terhadap pembinaan teknis irigasi yang dilakukan oleh Dinas Pengairan, Setiap awal Musim Tanam atau setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau tidak pernah dilakukan.

**C. Pengelolaan Air**

**1. Persentase jumlah debit untuk mengairi seluruh areal sesuai tanaman yang ada (rata-rata untuk MT 1, 2, dan 3)**

Pemantauan dilakukan terhadap jumlah debit air yang dialirkan ke sawah sudahkan sesuai/cukup dengan jumlah debit yang dihitung pada saat rencana dibuat.

**2. Persentase Luas Areal rencana tanam dibanding realisasi luas areal tanam.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi luas areal yang ditanami dari seluruh areal yang ada di wilayah oncoran daerah irigasi tersebut.

**3. Apabila keadaan air terbatas, usaha yang dilakukan oleh P3A :**

Mengadakan giliran baik petak/blok ataupun sekunder atau mengurangi jumlah air untuk seluruh areal atau memberikan/memprioritaskan air pada jenis tanaman yang butuh air banyak atau tidak ada usaha yang dilakukan oleh GP3A.

**4. Pembagian air yang telah dilakukan oleh P3A**

Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan P3A apakah telah melakukan pembagian air mulai dari intake/pengambilan atau dari saluran primer atau dari saluran sekunder atau di tingkat tersier saja.

**D. Pengembangan Pertanian.**

**1. Persentase Luas areal sawah yang ada dibanding dengan luas areal yang ditanami.**

Pemantauan dilakukan terhadap realisasi/kenyataan luas areal yang ditanami dari seluruh luas areal yang ada.

**2. Persentase Luas tanaman padi.**

Pemantauan dilakukan terhadap luas areal yang ditanami padi terhadap jumlah seluruh areal yang ada

**3. Persentase Luas tanaman Polowijo.**

Pemantauan dilakukan terhadap luas areal yang ditanami polowijo terhadap jumlah seluruh areal yang ada. Dan sebutkan jenis polowijonya .....

**4. Persentase Luas Tanaman Tebu**

Pemantauan dilakukan terhadap luas areal yang ditanami tebu terhadap jumlah seluruh areal yang ada.

## 5. Persentase Luas tanaman Ekonomi Tinggi.

Pemantauan dilakukan terhadap luas areal yang ditanami jenis tanaman yang mempunyai harga jual tinggi, terhadap jumlah seluruh areal yang ada. Dan sebutkan jenis tanamannya : .....

## 6. Produksi Padi Rata-rata.

Pemantau dilakukan terhadap hasil panen tanaman padi rata-rata dalam setahun (Ton/Ha).

### - Kriteria Penilaian.

Mengukur kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi digunakan skala-pengukuran kondisi jaringan irigasi yang dikelola oleh G/P3A dengan cara mengisi kuesioner yang telah disiapkan dengan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kriteria penilaian adalah antara 1 sampai 4, dimana nilai 1 diberikan untuk jawaban terburuk/terjelek, nilai 2 diberikan untuk jawaban kurang baik, nilai 3 diberikan untuk jawaban cukup baik, nilai 4 diberikan untuk jawaban paling baik.

**Tabel 3.4.** Kriteria Penilaian Kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

Aspek	Jumlah Pertanyaan	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Jumlah Maksimal
1. Kondisi Fisik mencakup Pemeliharaan	5	5	20	20
2. Pengembangan G/P3A di bidang Irigasi	5	5	20	20
3. Pengelolaan Air	4	4	16	16
4. Pengembangan Pertanian	6	6	24	24
Jumlah	20	20	80	80

Status tingkat kinerja Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi didapat dengan menjumlahkan seluruh nilai aspek yang terpantau. Tingkat kinerja dapat dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu :

- |  |              |
|--|--------------|
| - Bila jumlah nilai berkisar 0 – 20 :  | Tidak baik.  |
| - Bila jumlah nilai berkisar 21 – 40 : | Kurang baik. |
| - Bila jumlah nilai berkisar 41 – 60 : | Cukup baik.  |
| - Bila jumlah nilai berkisar 61 – 80 : | Sangat baik. |

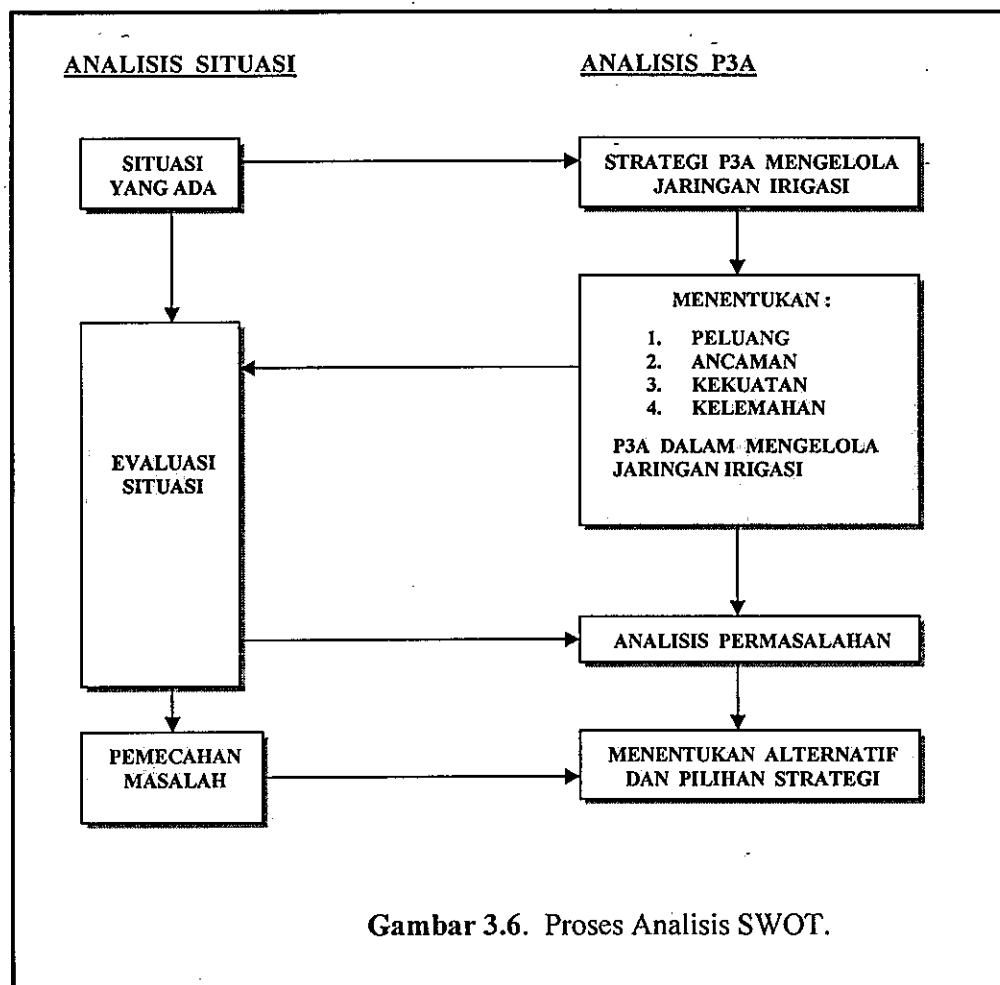
### **3.3. Menyusun Formulasi Strategis menggunakan metode SWOT.**

Organisasi Gabungan P3A yang berusaha untuk menjadi kelembagaan mandiri sesuai dengan tujuannya, akan berusaha mencari kesesuaian antara potensi kekuatan/kelebihan yang dimiliki (internal) dan potensi kekuatan/kelebihan eksternal (peluang dan ancaman). Kegiatannya meliputi; mengembangkan potensi sumberdaya manusia pengurus / anggota GP3A, menguasai kemampuan di bidang teknis irigasi (operasi dan pemeliharaan), menerapkan peraturan yang ada, mengefektifkan dan mengoptimalkan iuran pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan keleluasaan dalam memilih jenis tanaman yang menguntungkan secara ekonomi.

Organisasi GP3A juga dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan rumusan / formulasi strategis yang diawali dari proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi masing-masing ancaman tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal, sehingga P3A dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

### 3.3.1. Proses Analisis SWOT.

Proses analisis adalah melakukan kegiatan dengan cara memahami seluruh informasi yang ada pada kelembagaan P3A dan jaringan irigasi, kemudian menganalisis situasi untuk mengetahui seluruh permasalahan yang ada, dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah. Proses analisis kasus dapat dibaca pada gambar diagram berikut ini.



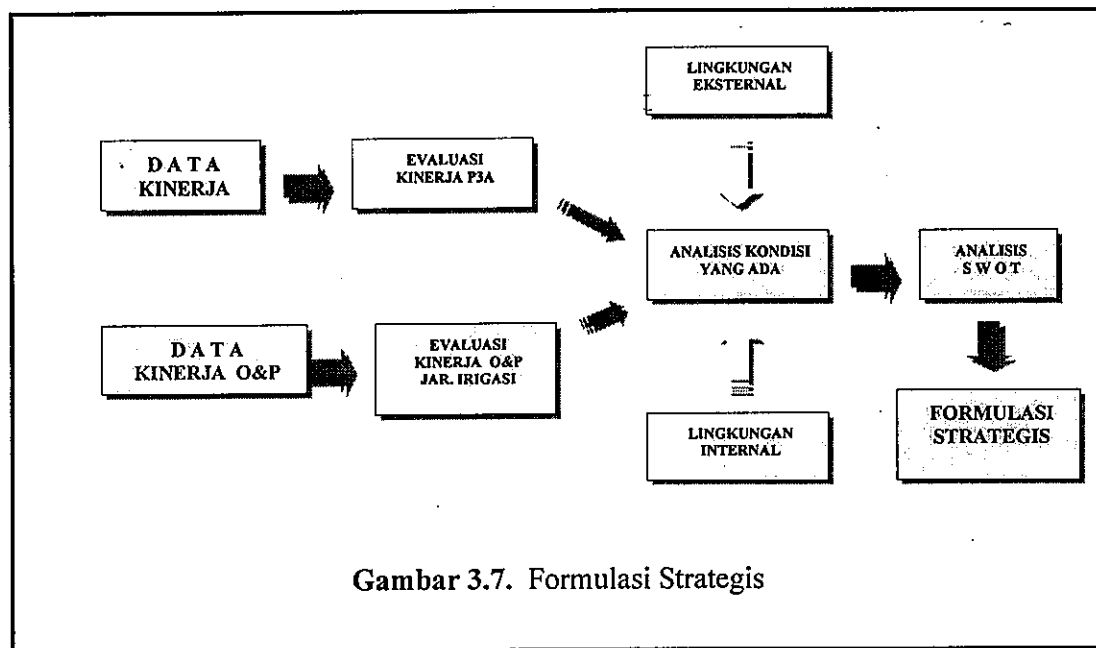
### 3.3.2. Kerangka Analisis.

Identifikasi permasalahan yang timbul dari berbagai faktor yang didapatkan dari pengumpulan data tersebut diatas, secara sistematis akan digunakan untuk merumuskan

suatu strategi agar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat mengelola jaringan irigasi, analisis ini dikenal dengan nama analisis SWOT. Dari data-data tersebut, analisis dilakukan berdasarkan pada :

- logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*) dan secara bersamaan;
- dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*).

Formulasi strategis tersebut dapat diperiksa pada gambar berikut ini:



Gambar 3.7. Formulasi Strategis

Tahapan perencanaan Strategis mengikuti tahapan berikut ini :

- Tahapan Penyusunan Aspek : Evaluasi Faktor Eksternal, Evaluasi Faktor Internal.
- Tahap Analisis : Matrik Internal-Eksternal, Matrik SWOT.
- Tahap Pengambilan Keputusan : (Formulasi Strategis).

### 3.3.2.1. Tahap Penyusunan aspek-aspek analisis.

#### - Evaluasi Faktor Eksternal.

Untuk melakukan evaluasi terhadap factor eksternal suatu kinerja, maka dapat digunakan pendekatan dengan Matrik Faktor Strategi Eksternal. Faktor Strategi Eksternal adalah factor-faktor strategis yang mempengaruhi suatu kinerja yaitu *peluang* dan *ancaman* (Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, 1998).

#### - Evaluasi Faktor Internal.

Untuk melakukan evaluasi terhadap factor internal suatu kinerja, maka dapat digunakan pendekatan dengan Matrik Faktor Strategi Internal. Faktor Strategi Internal adalah factor-faktor strategis yang juga mempengaruhi suatu kinerja yaitu *kekuatan* dan *kelemahan* (Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, 1998).

### 3.3.2.2. Tahap Analisis.

#### - Matrik Internal – Eksternal.

Berdasarkan aspek-aspek yang terevaluasi untuk faktor Internal dan Eksternal, tahap berikutnya adalah memanfaatkan seluruh faktor tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi, untuk itu model yang digunakan adalah Matrik Internal – Eksternal. Matrik Internal – Eksternal digunakan untuk mengetahui posisi kelembagaan P3A didasarkan pada faktor evaluasi Internal dan Eksternal. (Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, 1998).

#### - Matrik SWOT.

Alat yang dipakai untuk menyusun formulasi strategis kelembagaan G/P3A adalah Matrik SWOT. Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana



peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi lembaga G/P3A dengan memanfaatkan kekuatan dan kelemahannya sekaligus untuk menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Matrik SWOT dapat diperiksa pada tabel berikut.

**Tabel. 3.5. Matrik SWOT.**

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	- Tentukan 5 – 10 faktor-faktor kelemahan strategis.	- Tentukan 5 – 10 kekuatan Internal.
OPPORTUNIES (O)	STRATEGI SO - Ciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	STRATEGI WO - Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
TREATHS (T)	STRATEGI ST - Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi Ancaman.	STRATEGI WT - Ciptakan strategi yang meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman.

### 3.3.2.3. Tahap Penysunan Formulasi Strategis

Pengambilan keputusan dengan cara menyusun formulasi strategis yang didapat dari 4 alternatif strategis didasarkan pada Matrik SWOT. Empat alternatif strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO : I/G/P3A mempunyai peluang (Opportunity) dan kekuatan (Strength), dimana dengan kekuatan tersebut dapat I/G/P3A dapat memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada. Strategi yang dapat ditempuh oleh I/G/P3A adalah mendukung kinerja yang sedang tumbuh secara agresif tersebut.
2. Strategi ST : I/G/P3A mendapat berbagai ancaman, tetapi masih mempunyai kekuatan dari dalam (segi internal). Strategi yang dapat ditempuh oleh I/G/P3A

adalah menggunakan kekuatan dari dalam untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara/strategi diversifikasi (mis.: koperasi anggota, pemasaran hasil panen dsb.).

3. Strategi WO: I/G/P3A mempunyai masalah dan kendala internal, tetapi peluang yang sedang dihadapi sangat menguntungkan. Strategi yang dapat ditempuh oleh I/G/P3A adalah dengan meninjau kembali kinerja organisasi agar masalah dan kendala internal dapat diminimalkan, sehingga peluang yang menguntungkan segera dapat diraih.
4. Strategi WT: I/G/P3A sedang menghadapi kelemahan dari dalam organisasi (segi internal) dan juga ancaman yang sangat tidak menguntungkan. Strategi yang dapat ditempuh oleh I/G/P3A adalah dengan jalan meredam dan bertahan pada kinerja yang ada (defensif).

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

---

## **BAB IV.**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Analisis Data Kuesioner Kinerja O&P JI dan Kinerja P3A.**

Data berupa isian kuesioner tentang kinerja kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kemudian disusun dalam suatu tabel untuk mempermudah mengetahui hasil kinerja disetiap indikator/aspek pemantauan. Tahapannya adalah sebagai berikut :

- Buat tabel dengan susunan Nama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) versus Indikator/Aspek pemantauan untuk kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- Beri nilai sesuai isian/jawaban dimasing-masing pertanyaan (indikator/aspek pemantauan) dengan nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik).
- Bila kita memberi nilai +1 = tidak baik, +2 = kurang baik, +3 = cukup baik dan +4 = sangat baik, maka secara keseluruhan indikator/aspek pemantauan dapat diketahui nilai dan status masing-masing.

Untuk selanjutnya rekapitulasi hasil penelitian tentang Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ditabulasikan seperti tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

NO.	NAMA P3A	DESA	INDIKATOR YANG DIEVALUASI:														NILAI		STATUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			I. ORGANISASI		II. MANFAAT AIR			III. PEMELIHARAAN			IV. KEUANGAN			V. FISIK JAR. IRGS.			VI. PEMBINAAN P3A			TB	KB	CB	SB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			1.1. Kependudukan P3A (ada AD/ART ?)	300	200	200	200	800	300	200	300	800	100	200	200	500	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Kriteria Penilaian Status P3A:

TB = Tidak Baik : 0 - 20

KB = Kurang Baik : 21 - 40

CB = Cukup Baik : 41 - 60

SB = Sangat Baik : 61 - 80

Kriteria Penilaian Nilai:

1 = Tidak Baik : 0 - 20

2 = Kurang Baik : 21 - 40

3 = Cukup Baik : 41 - 60

4 = Sangat Baik : 61 - 80

**Tabel 4.2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI KINERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IIRIGASI**

NO.	NAMA DI	KABUPATEN	INDIKATOR YANG DIEVALUASI:														NILAI	STATUS												
			A. Kondisi Fisik Menaceup Pemeliharaan.					B. Pengembangan GP3A di Bidang Irigasi.					C. Pengelolaan Air					D. Pengembangan Pertanian				TB	KB	CB	SB					
			1. Persentase personil GP3A yang O&P rutin	2. Persentase Dana Pemeliharaan GP3A	3. Persentase Dana Pemeliharaan Kabupaten/Kota	4. Persentase jumlah Bangunan Ukur berfungsi	5. Persentase jumlah Priru Air berfungsi	Sub-Total Kondisi Fisik menaceup Pemeliharaan	6. Keunggulan GP3A	7. Rencana O&P oleh GP3A	8. Kegiatan GP3A mengelola II	9. Bila ada kerusakan, usaha yg dilakukan GP3A	10. Sub-Total Pengembangan GP3A di Bidang Irigasi	11. Persentase kecukupan debit untuk tanaman	12. Persentase Luas areal tanam	13. Bila air terbatas, usaha GP3A adalah ..	14. Kegiatan pembagian air oleh GP3A	Sub-Total Pengelolaan Air	15. Persentase realisasi luas areal yang dilayani	16. Persentase realisasi luas tanaman padi.	17. Persentase realisasi luas tanaman polowojo.	18. Persentase realisasi luas areal tanam tebu.	19. Persentase realisasi luas tanaman ekonomit tinggi.	20. Produkst rerata padi dalam setahun.	Sub-Total Pengembangan Pertanian					
1	Krido Makmur	Singodutan	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	16,00	3,00	3,00	4,00	4,00	14,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	53,00				V
2	Ngudi Makmur	Kaliancar	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	17,00	3,00	3,00	4,00	3,00	13,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	53,00				V
3	Sari Bumi	Gemantar	4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	16,00	3,00	3,00	4,00	2,00	12,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	51,00				V
4	Tri Mulyo	Sendangijo	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	3,00	3,00	2,00	4,00	3,00	15,00	3,00	3,00	4,00	2,00	12,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	49,00				V
5	Ngudi Mulyo	Numbangan	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	2,00	3,00	2,00	4,00	3,00	14,00	3,00	3,00	4,00	3,00	12,00	4,00	2,00	1,00	1,00	4,00	13,00	50,00				V
6	Sarono Mulyo	Jendi	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	8,00	2,00	3,00	2,00	5,00	2,00	14,00	3,00	3,00	4,00	3,00	12,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	45,00				V
7	Tirto Makmur	Pule	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	2,00	3,00	2,00	4,00	3,00	14,00	3,00	3,00	4,00	2,00	12,00	3,00	2,00	1,00	1,00	4,00	12,00	49,00				V
	Nilai Total		24,00	8,00	7,00	19,00	19,00	77,00	18,00	21,00	16,00	39,00	22,00	106,00	21,00	21,00	28,00	17,00	87,00	22,00	14,00	7,00	7,00	21,00	88,00	350,00				
	Nilai Rerata		3,43	1,14	1,00	2,71	2,71	11,00	2,57	3,00	2,29	4,14	3,14	15,14	3,00	3,00	4,00	2,43	12,43	3,14	2,00	1,00	1,00	3,19	11,43	50,00				V
8	GP3A Sapta Rata Tirta		3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	2,00	3,00	2,00	4,00	3,00	14,00	3,00	3,00	4,00	2,00	12,00	3,00	2,00	1,00	1,00	3,00	11,00	48,00				V
1	Bina Tirta	Krogowan	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	3,00	15,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	55,00				V
2	Sawangan	Sawangan	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	12,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	14,00	4,00	4,00	3,00	3,00	15,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	54,00				V
3	Gondotari	Gondowangi	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	12,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	15,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	51,00				V
4	Sumber Makmur	Pagersari	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	3,00	3,00	2,00	3,00	4,00	15,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	53,00				V
5	Adem Ayem	Mungkid	3,00	1,00	1,00	4,00	4,00	12,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	14,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	54,00				V
6	Sejahtera	Anbar Tawang	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	12,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	15,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	54,00				V
7	Tirto Agung	Blondoo	3,00	1,00	1,00	4,00	3,00	12,00	3,00	2,00	2,00	3,00	4,00	14,00	4,00	4,00	4,00	2,00	14,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	53,00				V
8	Ngudi Makmur	Bumirejo	3,00	1,00	1,00	3,00	3,00	11,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	14,00	4,00	4,00	4,00	3,00	15,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	53,00				V
	Nilai Total		21,00	8,00	8,00	29,00	28,00	94,00	24,00	21,00	17,00	24,00	31,00	117,00	32,00	32,00	32,00	19,00	115,00	32,00	24,00	8,00	8,00	24,00	104,00	430,00				
	Nilai Rerata		2,63	1,00	1,00	3,63	3,50	11,75	3,00	2,63	2,13	3,00	3,88	14,63	4,00	4,00	4,00	2,38	14,38	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	53,75				V
9	GP3A Tirta Makmur		4,00	1,00	1,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	3,00	15,00	4,00	3,00	1,00	1,00	3,00	13,00	56,00				V

DI KRISAK KAR. WONOGIRI

DI KROGOWAN KAR. MAGELANG

Keterangan:		Kategori Pembelian Sediaan PDA:
1	1 = Tidak Baik	TB = Tidak Baik : 0 - 20
2	2 = Kurang Baik	KB = Kurang Baik : 21 - 40
3	3 = Cukup Baik	CB = Cukup Baik : 41 - 60
4	4 = Sangat Baik	SB = Sangat Baik : 61 - 80

#### 4.1.1. Hasil Evaluasi Kinerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Dari hasil penilaian setiap sub-indikator yang dipantau, maka secara ringkas dapat ditabulasikan Kinerja P3A DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3.** Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja P3A Desa.

INDIKATOR	NILAI MAKS	P3A DI KROGOWANAN			P3A DI KRISAK		
		NILAI	% NILAI	STATUS	NILAI	% NILAI	STATUS
I. ORGANISASI	16.00	9.88	61.75	SB	10.00	62.50	SB
II. PEMANFAATAN AIR	12.00	8.38	69.83	SB	8.43	70.25	SB
III. PEMELIHARAAN	12.00	5.63	46.92	KB	6.00	50.00	CB
IV. KEUANGAN	16.00	7.63	47.69	KB	7.29	45.56	CB
V. FISIK JARINGAN IRIGASI	12.00	9.00	75.00	CB	6.43	53.58	CB
VI. PEMBINAAN	12.00	6.75	56.25	CB	6.71	55.92	CB
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>47.27</b>	<b>59.57</b>	<b>CB</b>	<b>44.86</b>	<b>56.30</b>	<b>CB</b>

**Tabel 4.4.** Rekapitulasi Hasil Evaluasi kinerja Gabungan P3A.

INDIKATOR	NILAI MAKS	GP3A DI KROGOWANAN			GP3A DI KRISAK		
		NILAI	% NILAI	STATUS	NILAI	% NILAI	STATUS
I. ORGANISASI	16.00	8.00	50.00	CB	10.00	62.50	SB
II. PEMANFAATAN AIR	12.00	7.00	58.33	CB	6.00	50.00	CB
III. PEMELIHARAAN	12.00	4.00	33.33	KB	4.00	33.33	KB
IV. KEUANGAN	16.00	8.00	50.00	CB	8.00	50.00	CB
V. FISIK JARINGAN IRIGASI	12.00	6.00	50.00	CB	6.00	50.00	CB
VI. PEMBINAAN	12.00	9.00	75.00	SB	7.00	58.33	CB
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>42.00</b>	<b>52.78</b>	<b>CB</b>	<b>41.00</b>	<b>50.69</b>	<b>CB</b>

Kriteria penilaian status kinerja P3A :

- TB = Tidak Baik : 0 – 20 ( 0% - 25% )  
 KB = Kurang Baik : 21 – 40 ( 26% - 50% )  
 CB = Cukup Baik : 41 – 60 ( 51% - 75% )  
 SB = Sangat Baik : 61 – 80 ( 76% - 100% )

Evaluasi setiap indikator yang dipantau pada kinerja P3A DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan P3A DI Krogowan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

A. ORGANISASI.

1. P3A desa DI Krisak (nilai sub total organisasi = 10.00) secara kelembagaan *lebih baik* dalam menjalankan organisasinya bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krogowan (nilai sub total organisasi = 9.88).
2. Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowan (nilai sub total organisasi = 8.00) secara kelembagaan *lebih jelek* dalam menjalankan organisasinya bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total organisasi = 10.00).

B. PEMANFAATAN AIR.

1. P3A desa DI Krisak (nilai sub total manfaat air = 8.43) *lebih baik* dalam memanfaatkan air yang ada, bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krogowan (nilai sub total manfaat air = 8.38).
2. Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowan (nilai sub total manfaat air = 7.00) *lebih baik* dalam memanfaatkan air yang ada, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total manfaat air = 6.00).

C. PEMELIHARAAN.

1. P3A desa DI Krisak (nilai sub total pemeliharaan = 6.00) *lebih baik* dalam memelihara jaringan tersiernya, bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krogowan (nilai sub total pemeliharaan = 5.63).
2. Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowan (nilai sub total pemeliharaan = 4.00) *sama buruknya* dalam memelihara jaringan irigasi utamanya, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total pemeliharaan = 4.00), nilai maksimal pemeliharaan = 12.00.

D. KEUANGAN.

1. P3A desa DI Krogowan (nilai sub total keuangan = 7.63) *lebih baik* dalam mengelola keuangan, bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krisak (nilai sub total keuangan = 7.29).



2. Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowanan (nilai sub total keuangan = 8.00) *sama baiknya* dalam mengelola keuangan, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total keuangan = 8.00), nilai maksimal pemeliharaan = 16.00.

#### E. FISIK JARINGAN IRIGASI.

1. Kondisi fisik jaringan tersier yang ada pada P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total fisik jaringan irigasi = 9.00) *lebih baik*, bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krisak (nilai sub total fisik jaringan irigasi = 6.43).
2. Kondisi fisik jaringan utama DI Krogowanan (nilai sub total fisik jaringan irigasi = 9.00) *jauh lebih baik* bila dibandingkan dengan DI Krisak (nilai sub total fisik jaringan irigasi = 5.63), nilai maksimal fisik jaringan irigasi = 12.00.

#### F. PEMBINAAN P3A.

1. Pembinaan P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total pembinaan = 6.75) *lebih baik*, bila dibandingkan dengan rerata pembinaan P3A desa DI Krisak (nilai sub total pembinaan = 6.71).
2. Pembinaan Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowanan (nilai sub total pembinaan = 4.00) *sama jeleknya* dalam memelihara jaringan irigasi utamanya, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total pemeliharaan = 4.00), nilai maksimal pemeliharaan = 12.00.

Evaluasi secara menyeluruh *Tingkat Kinerja Kelembagaan rerata P3A (desa/unit)* DI Krogowanan Kabupaten Magelang (total nilai = 47.27, status : *Cukup Baik*) *lebih baik* bila dibandingkan dengan kinerja P3A (desa/unit) DI Krisak Kabupaten Wonogiri (total nilai = 44.86, status : *Cukup Baik*), nilai maksimum = 80, dan *Tingkat Kinerja Kelembagaan Gabungan P3A* DI Krogowanan Kabupaten Magelang (total nilai = 42.00, status : *Cukup Baik*) *lebih baik* bila dibandingkan dengan kinerja GP3A DI Krisak Kabupaten Wonogiri (total nilai = 41.00, status : *Cukup Baik*).

#### 4.1.2. Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi.

Dari hasil penilaian setiap sub-indikator yang dipantau, maka secara ringkas dapat ditabulasikan hasil evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5.** Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi (Tk. Tersier) DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang.

INDIKATOR	NILAI MAKS	P3A DI KROGOWANAN			P3A DI KRISAK		
		NILAI	% NILAI	STATUS	NILAI	% NILAI	STATUS
A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN	20.00	11.75	58.75	CB	11.00	55.00	CB
B. PENGEMBANGAN GP3A DI BIDANG IRIGASI	20.00	14.63	73.15	CB	15.14	75.70	CB
C. PENGELOLAAN AIR	16.00	14.38	89.87	SB	12.43	77.69	SB
D. PENGEMBANGAN PERTANIAN	24.00	13.00	54.17	CB	11.43	47.63	CB
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>53.75</b>	<b>69.00</b>	<b>CB</b>	<b>48.00</b>	<b>64.01</b>	<b>CB</b>

**Tabel 4.6.** Hasil Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi (Tk. Jaringan Utama) DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang.

INDIKATOR	NILAI MAKS	P3A DI KROGOWANAN			P3A DI KRISAK		
		NILAI	% NILAI	STATUS	NILAI	% NILAI	STATUS
A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN	20.00	12.00	60.00	CB	11.00	55.00	CB
B. PENGEMBANGAN GP3A DI BIDANG IRIGASI	20.00	16.00	80.00	SB	14.00	70.00	CB
C. PENGELOLAAN AIR	16.00	15.00	93.75	SB	12.00	75.00	CB
D. PENGEMBANGAN PERTANIAN	24.00	13.00	54.17	CB	11.00	45.80	CB
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>16.00</b>	<b>71.96</b>	<b>CB</b>	<b>48.00</b>	<b>61.45</b>	<b>CB</b>

Kriteria penilaian status kinerja P3A :

- TB = Tidak Baik : 0 – 20 ( 0% - 25% )  
 KB = Kurang Baik : 21 – 40 ( 26% - 50% )  
 CB = Cukup Baik : 41 – 60 ( 51% - 75% )  
 SB = Sangat Baik : 61 – 80 ( 76% - 100% )

Evaluasi setiap indikator yang dipantau pada kinerja jaringan irigasi DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN.

1. Kondisi fisik jaringan irigasi (mencakup usaha-usaha pemeliharaan) di *tingkat tersier* pada P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total = 11.75) *lebih baik* bila dibandingkan dengan Kondisi fisik jaringan irigasi yang dikelola P3A desa DI Krisak (nilai sub total = 11.00).
2. Kondisi fisik jaringan irigasi (mencakup usaha-usaha pemeliharaan) di *tingkat jaringan utama* pada GP3A Tirto Makmur DI Krogowanan (nilai sub total = 12.00) *lebih baik* bila dibandingkan dengan Kondisi fisik jaringan irigasi yang dikelola oleh GP3A Rata Sapta Tirta DI Krisak (nilai sub total organisasi = 11.00).

B. PENGEMBANGAN GP3A/P3A DI BIDANG IRIGASI.

1. Usaha-usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh P3A desa DI Krisak di bidang irigasi tingkat tersier (nilai sub total = 15.14) *lebih baik* bila dibandingkan dengan usaha-usaha dan kegiatan yang dilakukan P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total = 14.63).
2. Usaha-usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh GP3A Tirto Makmur DI Krogowanan di bidang irigasi jaringan utama (nilai sub total = 16.00) *lebih baik* bila dibandingkan dengan usaha-usaha dan kegiatan yang dilakukan GP3A Rata Sapta Tirta DI Krisak (nilai sub total = 14.63).

C. PENGELOLAAN AIR.

1. P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total = 14.38) *lebih baik* dalam mengelola air di *jaringan tersiernya*, bila dibandingkan dengan rerata P3A desa DI Krisak (nilai sub total = 12.43).
2. Gabungan P3A Tirto Makmur DI Krogowanan (nilai sub total = 15.00) *lebih baik* dalam mengelola *jaringan irigasi utamanya*, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A Sapta Rata Tirta DI Krisak (nilai sub total = 12.00).

#### D. PENGEMBANGAN PERTANIAN.

1. Peningkatan usaha tani yang dilakukan oleh P3A desa DI Krogowanan (nilai sub total = 13.00) setelah mengelola jaringan irigasi di tingkat tersier *lebih baik* bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh P3A desa DI Krisak (nilai sub total keuangan = 11.43).
2. Peningkatan usaha tani yang dilakukan oleh Gabungan P3A Tirta Makmur DI Krogowanan (nilai sub total = 13.00) setelah mengelola jaringan irigasi di jaringan utama *lebih baik* bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh P3A desa DI Krisak (nilai sub total = 11.00).

Evaluasi secara menyeluruh terhadap *Tingkat Kinerja Jaringan Irigasi tersier dan jaringan utama*, DI Krogowanan Kabupaten Magelang (nilai rerata =  $(53.75 + 56.00) : 2 = 54.35$ , status : *Cukup Baik*) *lebih baik* bila dibandingkan dengan DI Krisak Kabupaten Wonogiri (nilai rerata =  $(50.00 + 48.00) : 2 = 49.00$ , status : *Cukup Baik*), nilai maksimal = 80.00.

## 4.2. Pembahasan Hasil Evaluasi.

Hasil evaluasi kinerja P3A dan kinerja Jaringan Irigasi merupakan potret kondisi yang ada sekarang dan membandingkannya terhadap 2 kasus studi yang sama-sama lembaga P3A telah merima kewenangan untuk mengelola jaringan irigasi. Bagaimana status yang ada tersebut bila dibandingkan dengan kondisi daerah irigasi yang lain ataupun bila ditinjau dengan peraturan-peraturan yang ada dan sedang berlaku di daerah masing-masing, apakah P3A dalam mengelola jaringan irigasi lebih siap bila dibandingkan dengan Pemerintah (Daerah) yang memiliki kewenangan wajib mengelola jaringan irigasi. (*UU 22 / 1999 tentang Pemerintah Daerah*).

### 4.2.1. Pembahasan Kinerja P3A.

Dari hasil evaluasi kinerja P3A desa dan Gabungan P3A di DI Krogowanan dan DI Krisak telah diuraikan pada sub-bab 4.1. sebelumnya secara rinci berikut status tingkat kinerja masing-masing GP3A dan P3A. Selanjutnya pembahasan kinerja P3A secara menyeluruh terhadap kondisi lingkungan diluar masing-masing DI dengan mengacu pada aspek hukum yang sedang berlaku.

#### A. ORGANISASI.

- Aspek Organisasi dengan prosentase nilai 50% - 62.50% (terhadap skala 100%) sangatlah terbatas. Dengan bertambahnya tugas dan tanggungjawab sesuai PP 77 / 2001, maka AD/ART P3A perlu direvisi agar organisasi dapat lebih bergairah lagi dengan wawasan pengelolaan satu DI satu kesatuan pengelolaan.
- Pemberdayaan organisasi P3A dapat mengacu pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A* dan *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota*.

- Organisasi G/P3A mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam membantu keterbatasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan wajib di bidang pengelolaan jaringan irigasi (periksa *UU 22 / 1999 tentang Pemerintah Daerah*), terutama dalam penyediaan tenaga/personil dalam mengelola jaringan irigasi dalam satu kesatuan pengelolaan, bila dibandingkan dengan keterbatasan Pemerintah Daerah dalam menyediakan personil untuk mengelola jaringan irigasi, terutama tenaga lapangan yang telah pensiun, Pemerintah Daerah sangat sulit merekrut penggantinya, mengingat keterbatasan dana untuk menggaji personil baru. Sehingga kinerja jaringan irigasi dikhawatirkan akan menurun secara drastis.
- Memberikan peran kepada organisasi G/P3A sebagai pemeran utama dalam mengelola jaringan irigasi utama akan semakin mendidik (pembelajaran) dan menjadikan organisasi lebih mandiri, mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab, sesuai dengan pengaturan kembali tu-pok-si Lembaga Pengelola Irigasi yang tertuang di dalam *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2002 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota*.

#### **B. PEMANFAATAN AIR.**

- Aspek Pemanfaatan Air dengan prosentase nilai 50% - 62.50% (terhadap skala 100%) sangatlah terbatas. Dengan bertambahnya tugas dan tanggungjawab sesuai PP 77 / 2001, maka agar aspek organisasi dapat lebih meningkat, supaya lebih diberdayakan lagi dengan mengacu pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A* dan *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2003 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A*.
- Kondisi air (sumber air) yang terbatas akan menjadikan aktifitas P3A desa lebih giat dalam menjalankan roda organisasi agar air dapat sampai ke sawahnya (tingkat tersier), menuju pemakaian air yang efisien.
- Pemanfaatan air akan mengganggu aktifitas G/P3A apabila kondisi fisik jaringan irigasi utama dan bangunan utama (pengambilan air) tidak dalam kondisi optimal.
- Melalui Komisi Irigasi Kabupaten, G/P3A akan lebih demokratis dalam menyalurkan aspirasi tentang jenis tanaman (bebas menanam jenis tanaman yang

nilai jualnya tinggi) dan keandalan air irigasi yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

- Hak Guna Air yang ikut diserahkan kepada G/P3A dalam bentuk Ijin, akan memperlancar pengaturan kembali Tu-Pok-Si LPI sesuai *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2002 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota*, sehingga pemanfaatan air irigasi akan menuju pemakaian yang efisien dan optimal.

#### C. PEMELIHARAAN.

- Program kerja Pemeliharaan wajib dibuat oleh G/P3A secara menyeluruh dalam 1 DI, berjenjang mulai tingkat tersier, sekunder, primer/induk sampai dengan bangunan pengambilan.
- Menyusun program kerja dan melaksanakan program pemeliharaan secara tertib merupakan kelemahan G/P3A selama ini (prosentase nilai < 50%). Dengan terbentuknya Komisi Irigasi dan terbitnya *Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota* akan membantu mengurangi kelemahan G/P3A tersebut.

#### D. KEUANGAN.

- Mengumpulkan Iuran pengelolaan irigasi yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART merupakan kelemahan yang paling menonjol ditemui di G/P3A (prosentase nilai < 50%), walaupun secara tertib pengurus telah mengupayakan penagihan.
- Apabila *Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota* sudah berlaku dan berjalan secara efektif, maka sistem dan cara pengumpulan Iuran di tingkat G/P3A dapat dievaluasi kembali agar lebih efektif dan manfaat.

#### E. FISIK JARINGAN IRIGASI.

- Kondisi fisik jaringan irigasi terutama tingkat jaringan utama tidak mencerminkan hasil pengelolaan oleh G/P3A, karena lebih dominant hasil dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah yang diserahkan kepada G/P3A.

- Kondisi fisik jaringan irigasi yang buruk akan membuat G/P3A sulit mengelolanya, sehingga usaha-usaha perbaikan fisik jaringan irigasi akan kembali terbentur pada kemampuan keuangan organisasi G/P3A. Oleh karena itu pemberlakuan *Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota*, akan sangat membantu dan menumbuhkan potensi kontribusi yang dimiliki oleh anggota G/P3A.

#### F. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH.

- Pembinaan G/P3A oleh Instansi terkait secara periodic dan intensif menunjukkan kemajuan dan keaktifan organisasi yang cukup baik, dan akan semakin menggairahkan G/P3A dalam berorganisasi apabila stimulant dan pemenuhan kebutuhan fisik mengiringi pembinaan tersebut.
- Pembinaan G/P3A akan lebih efektif dan manfaat apabila pengeterapan pedoman-pedoman yang telah dikeluarkan oleh Departemen Teknis sesuai kewenangannya dijalankan secara baik dan benar dan berjalan secara terintegrasi.

#### 4.2.2. Pembahasan Kinerja Jaringan Irigasi.

Secara rinci evaluasi kinerja jaringan irigasi telah dievaluasi pada sub-bab 4.1. sebelumnya, sehingga dalam sub-bab kali ini pembahasan akan lebih jelas apabila dibandingkan dengan kinerja jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

**Tabel 4.7.** Perbandingan Prosentase Nilai Kuesioner Pengelolaan Irigasi oleh P3A dan Pemerintah.

INDIKATOR	P3A DI KROGOWANAN	P3A DI KRISAK	DI Pemerintah *)
	% NILAI	% NILAI	% NILAI
A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN	60.00	55.00	89.67
B. PENGEMBANGAN GP3A DI BIDANG IRIGASI	80.00	70.00	56.12
C. PENGELOLAAN AIR	93.75	75.00	92.00
D. PENGEMBANGAN PERTANIAN	54.17	45.80	60.00
<b>TOTAL</b>	<b>287.92</b>	<b>245.80</b>	<b>297.79</b>

\*) Sumber : M&E 13 Indikator Daerah Irigasi Pasca R/U MT 2001/2002 rerata Kabupaten Magelang oleh Proyek Irigasi Andalan Jawa Tengah.



Mencermati tabel diatas maka dapat kita bandingkan antara DI yang dikelola oleh P3A dan Pemerintah, sebagai berikut :

A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN.

- Kondisi fisik jaringan irigasi mencakup pemeliharaan lebih baik bila dikelola oleh Pemerintah, karena Pemerintah selalu menjamin pengalokasian dana Pemeliharaan melalui APBN/APBD, bila dibandingkan dengan kemampuan P3A mengumpulkan iuran dari anggotanya.

B. PENGEMBANGAN GP3A DI BIDANG IRIGASI.

- Pengembangan GP3A di bidang irigasi lebih intensif dan efektif bila dikelola oleh GP3A, dikarenakan antusias para petani dalam menimba ilmu irigasi dari petugas Pengairan/Pertanian, agar lebih mandiri mandiri.

C. PENGELOLAAN AIR TERMASUK EFISIENSI OPERASIONAL.

- Pengelolaan air dengan prinsip membagi air secara efisien, lebih baik apabila dikelola oleh Pemerintah, dengan SDM yang lebih berkualitas melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama dengan konsep EOM.

D. PENGEMBANGAN PERTANIAN.

- Pengembangan Pertanian lebih baik bila dikelola oleh Pemerintah, pengelolaan air dan efisiensi operasional (EOM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dengan dukungan saprotan yang baik, produktivitas tanaman juga semakin baik.

Dari tabel 4.7. juga terlihat secara keseluruhan pengelolaan jaringan irigasi masih lebih baik apabila dikelola oleh Pemerintah (nilai Pemerintah = 297.79 dan P3A = 245.80 – 287.92). Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum melaksanakan secara utuh 5 kebijakan pokok pembaharuan pengelolaan irigasi yaitu;

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Redefinisi Tugas LPI                  | - Kepmen.DaGri. No. 22 / 2003             | - Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab LPI Propinsi & Kabupaten/Kota. |
| 2. Pemberdayaan P3A                      | - Kepmen.DaGri. No. 50 / 2001             | - Pemberdayaan P3A.   |
| 3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi. (PPI) | - Kepmen.Kimpraswil No. 529 /KPTS/ M/2001 | - Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A.                       |
| 4. Pendanaan Irigasi                     | - Kepmen. Keuangan No. 298 /KMK.02 / 2003 | - Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.                         |
| 5. Keberlanjutan Irigasi                 | - ( Belum terbit )                        | - ( Belum terbit )  |

Keterangan : 1 dan 4 belum dilaksanakan.

#### 4.3. Menyusun Formulasi Strategis.

Tahapan dalam menyusun formulasi strategis dengan menggunakan metode SWOT, seperti diuraikan pada BAB 3 Metode Penelitian, secara berurutan dapat diperiksa pada sub-sub bab berikut.

##### 4.3.1. Menyusun dan Menentukan Faktor Strategi Eksternal.

Faktor Strategi Eksternal adalah factor-faktor strategis yang mempengaruhi suatu kinerja yaitu *peluang* (Opportunity) dan *ancaman* (Threat), disusun dan ditentukan berdasarkan data-data dan informasi yang didapatkan dari aspek-aspek tingkat kinerja kelembagaan G/P3A dan tingkat kinerja O&P jaringan irigasi.

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal.

- i. Susunlah 5 peluang dan 5 ancaman : *kolom 1*.
- ii. Tentukan nilai bobot mulai dari 1.0 (sangat penting) hingga 0.0 (tidak penting) : *kolom 2*.
- iii. Hitung rating untuk masing-masing factor dengan memberi skala mulai 4 (baik sekali) hingga 1 (tidak baik) berdasarkan pengaruh factor tersebut terhadap kondisi kinerja yang bersangkutan. Faktor Peluang diberi tanda positif (+4 = peluang paling besar, +1 = peluang kecil). Faktor Ancaman adalah kebalikannya ( 1 = ancaman sangat besar, 4 = ancaman sedikit ); *kolom 3*.
- iv. Kolom 2 kalikan dengan kolom 3 ; *kolom 4*. Hasilnya adalah nilai pembobotan untuk masing-masing factor (4 = baik sekali, hingga 1 = tidak baik).
- v. *Kolom 5* : digunakan untuk memberikan catatan dan cara perhitungan.

Tabel 4.8. Penentuan Faktor Strategi Eksternal.

FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	CATATAN
<b>PELUANG (OPPORTUNITY) :</b>				
1. Kewenangan mengelola Ji scr. Utuh.	0.20	4	0.80	
2. Memanfaatkan Dana Pengel. Irigasi	0.20	4	0.80	
3. Menanam tanaman ekonomi tinggi	0.15	4	0.60	
4. Berwira-usaha (GP3A Badan Hukum)	0.15	3	0.45	
5. Menerima Pembinaan Dinas Teknis	0.10	3	0,30	
<b>ANCAMAN (THREATS) :</b>				
1. Dana O&P semakin tinggi.	0.02	3	0.06	
2. Kualitas bangunan Ji semakin turun	0.05	3	0.15	
3. Subsidi Pemerintah dikurangi	0.05	3	0.15	
4. Harga produksi turun, pada panen raya.	0.05	2	0.10	
5. Sumber air semakin menurun	0.03	2	0.06	
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>		<b>3.47</b>	

#### 4.3.2. Menyusun dan Menentukan Faktor Strategi Internal.

Faktor Strategi Internal adalah faktor-faktor strategis yang juga mempengaruhi suatu kinerja yaitu *kekuatan (Strengths)* dan *kelemahan (Weaknesses)*, disusun dan ditentukan berdasarkan data-data dan informasi yang didapatkan dari aspek-aspek tingkat kinerja kelembagaan G/P3A dan tingkat kinerja O&P jaringan irigasi.

Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal.

- Susunlah 5 peluang dan ancaman : *kolom 1*.
- Tentukan nilai bobot mulai dari 1.0 (sangat penting) hingga 0.0 (tidak penting) : *kolom 2*.
- Hitung rating untuk masing-masing factor dengan memberi skala mulai 4 (baik sekali) hingga 1 (tidak baik) berdasarkan pengaruh factor tersebut terhadap kondisi kinerja yang bersangkutan. Faktor Peluang diberi tanda positif (+4 = peluang paling besar, +1

= peluang kecil). Faktor Ancaman adalah kebalikannya ( 1 = ancaman sangat besar, 4 = ancaman sedikit ): *kolom 3*.

iv) Kolom 2 kalikan dengan kolom 3 ; *kolom 4*. Hasilnya adalah nilai pembobotan untuk masing-masing faktor (4 = baik sekali, hingga 1 = tidak baik).

v) *Kolom 5* : digunakan untuk memberikan catatan dan cara perhitungan.

**Tabel 4.9. Penentuan Faktor Strategi Internal.**

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	CATATAN
<b><u>KEKUATAN (STRENGTHS) :</u></b>				
1. Organisasi G/P3A ber BH.	0.20	4	0.80	
2. Jiwa Gotong-royong tinggi.	0.15	4	0.60	
3. Pengurus dan anggota GP3A jujur.	0.15	3	0.45	
4. Potensi berkontribusi	0.20	3	0.60	
5. Dukungan Pemerintah Daerah	0.10	4	0.40	
<b><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES) :</u></b>				
1. Kemampuan SDM G/P3A terbatas	0.02	3	0.06	
2. Organisasi G/P3A belum mandiri	0.05	2	0.10	
3. Iuran kurang lancar.	0.05	2	0.10	
4. Pemasaran pasca panen tidak terjamin.	0.05	3	0.15	
5. Teknis irigasi jar.utama lebih kompleks.	0.03	2	0.06	
<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>		<b>3.32</b>	

#### 4.3.3. Menyusun Matrik Eksternal-Internal.

Setelah Faktor Strategi Eksternal dan Faktor Strategi Internal disusun, maka untuk mempertajam analisis perlu diketahui posisi organisasi G/P3A serta melihat arah perkembangannya dengan cara membuat Matrik Internal-Eksternal berikut :

**Tabel 4.10.** Matriks Internal – Eksternal.

		Skor Faktor Strategi Internal		
		KUAT	RATA-RATA	LEMAH
Skor Faktor Strategi Eksternal	TINGGI	4.0 I Penguatan G/P3A	3.0 II Penguatan G/P3A	2.0 III Konsolidasi G/P3A
	MENENGAH	3.0 IV Stabilitas G/P3A	2.0 V Penguatan Stabilitas	1.0 VI Konsolidasi G/P3A
	RENDAH	2.0 VII Penguatan G/P3A	1.0 VIII Penguatan G/P3A	1.0 IX Re Organisasi G/P3A

Dari Matriks Internal – Eksternal diatas diketahui *posisi Organisasi Gabungan P3A saat ini* adalah dalam kondisi membutuhkan *perkuatan kelembagaan melalui pemberdayaan organisasi G/P3A* untuk meningkatkan kualitas organisasi dalam melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi.

#### 4.3.4. Menyusun Matrik SWOT.

Kajian pengelolaan jaringan irigasi oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan kajian terhadap kinerja jaringan irigasi dan kinerja organisasi P3A. Kedua kinerja tersebut dapat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Analisa SWOT akan membandingkan antara factor eksternal Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*) dengan factor internal Kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*).

Analisis dengan menggunakan matriks SWOT disusun berdasarkan Faktor Strategi Eksternal yang disusun pada Tabel 4.8. dan Faktor Strategi Internal yang disusun pada Tabel 4.9, dengan susunan matrik seperti ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 4.11. Matrik SWOT.

	<b><u>KEKUATAN (STRENGTHS) :</u></b> 1. Organisasi G/P3A ber BH. 2. Jiwa Gotong-royong tinggi. 3. Pengurus dan anggota GP3A jujur. 4. Potensi berkontribusi 5. Dukungan Pemerintah Daerah	<b><u>KELEMAHAN (WEAKNESSES) :</u></b> 1. Kemampuan SDM G/P3A terbatas 2. Organisasi G/P3A belum mandiri 3. Iuran kurang lancar. 4. Pemasaran pasca panen tidak terjamin. 5. Teknis irigasi jar. utama lebih kompleks.
<b><u>PELUANG (OPPORTUNITY) :</u></b> 1. Kewenangan mengelola JI scr. Utuh. 2. Memanfaatkan Dana Pengel. Irigasi 3. Menanam tanaman ekonomi tinggi 4. Berwira-usaha (GP3A Badan Hukum) 5. Menerima Pembinaan Dinas Teknis	<b><u>STRATEGI SO :</u></b> 1. Perkuat organisasi GP3A untuk mengelola jaringan irigasi dlm. 1 kesatuan pengelolaan. 2. Menanam jenis tanaman unggul, unt. Meningkatkan produktifitas & pendapatan. 3. Manfaatkan semaksimal mungkin pembinaan Dinas Teknis.	<b><u>STRATEGI WO :</u></b> 1. Upayakan peluang pemberdayaan Organisasi P3A dari Dinas Teknis. 2. Tingkatkan budidaya pertanian, shg. Produksi meningkat. 3. Ciptakan mekanisme pasar yang lebih baik pasca panen raya, agar harga tidak turun.
<b><u>ANCAMAN (THREATS) :</u></b> 1. Dana O&P semakin tinggi. 2. Kualitas bangunan JI semakin turun 3. Subsidi Pemerintah dikurangi 4. Harga produksi turun, pd. panen raya. 5. Sumber air semakin menurun	<b><u>STRATEGI ST :</u></b> 1. Dengan modal org. GP3A Ber-BH ciptakan peluang memperbaiki kual/kuan. SDM. 2. SDM yang baik, modal untuk menghasilkan kualitas JI yg. baik. 3. Upayakan didlm. Program kerja GP3A : membantu konservasi lahan.	<b><u>STRATEGI WT :</u></b> 1. Pembinaan Dinas Teknis dlm. Rangka peningkatan SDM G/P3A, O&P efisien dan kualitas bangunan 2. Ciptakan mekanisme pasar yang lebih baik pasca panen raya, agar harga tidak turun. 3. Leluasa dalam memilih jenis tanaman agar harga jual pasca panen tetap tinggi.

#### 4.3.5. Menyusun Formulasi Strategis.

Dari matriks SWOT tersebut diatas, maka dapat disusun 4 set formulasi strategis kelembagaan P3A dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi, sebagai berikut :

##### 1. Strategi S-O (Kekuatan – Peluang).

- Memperkuat kelembagaan P3A yang ada untuk melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi secara utuh.
- Memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anggota P3A dalam menentukan jenis tanaman yang produktif dan mempunyai nilai jual yang tinggi (atau mahal) untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan.
- Kelembagaan P3A yang kuat akan bermanfaat untuk memperoleh setiap kesempatan peluang pembinaan dari Dinas terkait agar seluruh anggota P3A benar-benar berdaya di semua aspek.

##### 2. Strategi S-T (Kekuatan – Ancaman).

- Kelembagaan P3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Teknis terkait untuk memperoleh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memperbanyak jumlah SDM berkualitas dalam kelembagaan P3A.
- SDM berkualitas yang dimiliki oleh P3A akan meningkatkan kualitas jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A.
- Semakin banyaknya SDM berkualitas yang dimiliki oleh P3A serta semakin baiknya jaringan irigasi, akan mempermudah P3A melaksanakan program kerja konservasi lahan.

##### 3. Strategi W-O (Kelemahan – Peluang)

- Kelembagaan P3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Teknis terkait untuk memperoleh peluang pemberdayaan dari Dinas Teknis terkait..

- P3A harus meningkatkan perolehan kesempatan pemberdayaan pada aspek Pertanian (budi daya pertanian) agar pengetahuan P3A semakin meningkat terhadap hal-hal terbaru mengenai budidaya pertanian.
- P3A harus memanfaatkan jejaring informasi pasar hasil produksi pertanian, agar kendala nilai jual pasca panen raya dapat diatasi.

4. Strategi W-T (Kelemahan – Ancaman).

- Pembinaan yang sifatnya rutin dari Dinas terkait dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar kelembagaan P3A dapat tetap eksis.
- Dengan segala keterbatasannya, P3A dapat memanfaatkan/menanam jenis-jenis bibit unggul, agar nilai jual yang rendah pada saat panen raya tidak terlalu merugikan mereka, dengan cara mengatur sistem dan cara penjualannya.
- Peluang dan belajar menanam jenis tanaman yang harga jualnya tinggi, dapat segera diterapkan oleh P3A, sehingga memperoleh hasil pembelajaran menanam jenis tanaman harga jual tinggi pada situasi dan kondisi yang tepat.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

---

## BAB 5.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penyusunan formulasi strategis hasil dari Matriks SWOT, maka dapat diketahui usaha dan upaya yang harus dilakukan oleh kelembagaan P3A dalam menjalankan kewenangan mengelola jaringan irigasi dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan. Beberapa Kesimpulan dan Saran yang dapat dicermati dari hasil penelitian dan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

#### 5.1. Kesimpulan.

Hasil Penelitian serta kajian P3A dalam mengelola irigasi pada kasus studi di DI Krisak Kabupaten Wonogiri dan DI Krogowanan Kabupaten Magelang yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut ;

##### 5.1.1. Kinerja Lembaga G/P3A.

###### A. ORGANISASI.

- Organisasi Gabungan P3A DI Krisak (nilai 10.00) dan P3A desa DI Krisak secara *organisasi lebih baik* bila dibandingkan dengan Gabungan P3A DI Krogowanan (nilai 8.00) dan P3A desa DI Krogowanan (nilai 9.88).

###### B. PEMANFAATAN AIR.

- P3A desa DI Krisak (nilai 8.43) *lebih baik* dalam memanfaatkan air, bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krogowanan (nilai 8.38).
- Gabungan P3A DI Krogowanan (nilai 7.00) *lebih baik* dalam memanfaatkan air, bila dibandingkan dengan Gabungan P3A DI Krisak (nilai 6.00).

### C. PEMELIHARAAN.

- P3A desa DI Krisak (nilai 6.00) dan GP3A DI Krisak (nilai 4.00) *lebih baik* dalam memelihara jaringan irigasinya, bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krogowanan (nilai 5.63) dan GP3A DI Krogowanan (nilai 4.00).

### D. KEUANGAN.

- P3A desa DI Krogowanan (nilai 7.63) dan GP3A DI Krogowanan (nilai 8.00) *lebih baik* dalam mengelola keuangan, bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krisak (nilai 7.29) dan GP3A DI Krisak (nilai 8.00).

### E. FISIK JARINGAN IRIGASI.

- Kondisi fisik jaringan irigasi P3A desa DI Krogowanan (nilai 9.00) dan GP3A DI Krogowanan (nilai 9.00) *lebih baik*, bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krisak (nilai 6.43) dan GP3A DI Krisak (nilai 5.63).

### F. PEMBINAAN P3A.

- Pembinaan P3A desa DI Krogowanan (nilai 6.75) dan GP3A DI Krogowanan (nilai 4.00) *lebih baik*, bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krisak (nilai 6.71) dan GP3A DI Krisak (nilai 4.00).

*Tingkat Kinerja Kelembagaan rerata P3A (desa/unit) (total nilai = 47.27, status : Cukup Baik) dan Gabungan P3A DI Krogowanan Kabupaten Magelang (total nilai = 42.00, status : Cukup Baik) lebih baik* bila dibandingkan dengan kinerja P3A (desa/unit) (total nilai = 44.86, status : Cukup Baik), dan GP3A DI Krisak Kabupaten Wonogiri (total nilai = 41.00, status : Cukup Baik).

#### **5.1.2. Kinerja Jaringan Irigasi.**

##### A. KONDISI FISIK MENCAKUP PEMELIHARAAN.

- Kondisi fisik jaringan irigasi *tersier* (nilai 11.75) dan jaringan *utama* (nilai 12.00) yang dikelola oleh G/P3A DI Krogowanan *lebih baik* bila dibandingkan dengan Kondisi fisik jaringan irigasi *tersier* (nilai 11.00) dan jaringan *utama* (nilai 11.00) yang dikelola oleh G/P3A DI Krisak.

## B. PENGEMBANGAN GP3A/P3A DI BIDANG IRIGASI.

- Pengembangan P3A di bidang Irigasi *Tersier* P3A desa DI Krisak (nilai 15.14) *lebih baik* bila dibandingkan dengan P3A desa DI Krogowanan (nilai 14.63).
- Pengembangan GP3A di bidang Irigasi *Jaringan Utama* GP3A DI Krogowanan (nilai 16.00) *lebih baik* bila dibandingkan dengan GP3A DI Krisak (nilai 14.63).

## C. PENGELOLAAN AIR.

- P3A desa (nilai 14.38) dan GP3A (nilai 15.00) DI Krogowanan *lebih baik* dalam mengelola air irigasi, bila dibandingkan dengan P3A desa (nilai 12.43) dan GP3A (nilai 12.00) DI Krisak.

## D. PENGEMBANGAN PERTANIAN.

- Pengembangan Pertanian di G/P3A DI Krogowanan (nilai sub total = 13.00) *lebih baik* bila dibandingkan dengan Pengembangan Pertanian di G/P3A DI Krisak (nilai sub total = 11.43).

*Tingkat Kinerja Jaringan Irigasi* DI Krogowanan Kabupaten Magelang (nilai rerata 54.35, status : *Cukup Baik*) *lebih baik* bila dibandingkan dengan DI Krisak Kabupaten Wonogiri (nilai rerata 49.00, status : *Cukup Baik*).

Sedangkan *Tingkat Kinerja Jaringan Irigasi* yang dikelola oleh Pemerintah (nilai rerata 297.79) *lebih baik* bila dibandingkan dengan pengelolaan oleh G/P3A (nilai 245.80 – 287.92), hal tersebut terjadi karena *Pemerintah belum melaksanakan secara utuh 5 kebijakan pokok pembaharuan pengelolaan irigasi.*

### **5.1.3. Status Kelembagaan G/P3A.**

Dari hasil penyusunan Matriks Internal – Eksternal diketahui *posisi Organisasi G/P3A* saat ini adalah dalam kondisi membutuhkan *perkuatan kelembagaan melalui pemberdayaan organisasi G/P3A* (posisi koordinat 3.32 , 3.47) untuk meningkatkan kualitas organisasi dalam melaksanakan kewenangan mengelola jaringan irigasi.

#### **5.1.4. Formulasi Strtegis (Hasil analisis SWOT).**

Setelah tingkat kinerja G/P3A diketahui dan kemudian Posisi status GP3A juga diketahui, maka usaha-usaha untuk memperbaiki segala kelemahan dan kekurang yang ada pada G/P3A secara strategis dapat diformulasikan sebagai berikut:

##### **1. Strategi S-O (Kekuatan – Peluang).**

- Memperkuat kelembagaan P3A melalui program pemberdayaan P3A.
- Beri keleluasaan P3A dalam menentukan jenis tanaman yang produktif dan mempunyai nilai jual yang tinggi (atau mahal) untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan.

##### **2. Strategi S-T (Kekuatan – Ancaman).**

- Kelembagaan P3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- SDM berkualitas yang dimiliki oleh P3A akan meningkatkan kualitas jaringan irigasi yang dikelola ole P3A.

##### **3. Strategi W-O (Kelemahan – Peluang).**

- Kelembagaan P3A yang telah berbadan hukum mempunyai kesempatan meningkatkan kesempatan pemberdayaan pada aspek Pertanian (budi daya pertanian) dan jejaring informasi pasar hasil produksi pertanian, agar kendala nilai jual pasca panen raya dapat disiasati.

##### **4. Strategi W-T (Kelemahan – Ancaman).**

- Pembinaan yang sifatnya rutin dari Dinas terkait dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar, P3A dapat memanfaatkan/menanam jenis-jenis bibit unggul, agar nilai jual yang rendah pada saat panen raya tidak terlalu merugikan mereka, dengan cara mengatur sistem dan cara penjualannya.

## 5.2. Saran.

Kesimpulan-kesimpulan yang tertulis pada sub-bab 5.1. (5.1.1. sampai dengan 5.1.3.) merupakan hasil nyata berdasarkan penelitian di 2 DI yaitu DI Krisak dan DI Krogowanan, dan diupayakan perbaikannya pada sub-bab 5.1.4. Agar upaya yang diformulasikan pada sub-bab 5.1.4. dapat terlaksana dengan baik maka beberapa saran berikut ini dapat dipertimbangkan, antara lain;

- A. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing disarankan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tentang P3A mengelola jaringan irigasi, utamanya pada jaringan utama daerah irigasi dengan luas areal lebih besar 500 ha.
- B. Melalui Komisi Irigasi (Propinsi dan Kabupaten), Dinas teknis terkait dapat menyusun program pemberdayaan P3A (umumnya aspek organisasi, aspek teknis irigasi, aspek sosial-ekonomi dan aspek pengembangan pertanian) secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan P3A.
- C. Untuk mendukung kesimpulan 5.1.1., 5.1.2., dan 5.1.3. serta melaksanakan saran butir (A) dan (B), Pemerintah Propinsi dan Kabupaten disarankan aktif menyusun dan menetapkan perangkat hukum di daerahnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Pusat) yang terbaru, sesuai arah dari Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang sudah ditetapkan yaitu melaksanakan secara utuh 5 kebijakan pokok yang telah dilengkapi dengan 4 pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait yaitu;

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Redefinisi Tugas LPI                  | - Kepmen.DaGri. No. 22 / 2003             | - Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab LPI Propinsi & Kabupaten/Kota. |
| 2. Pemberdayaan P3A                      | - Kepmen.DaGri. No. 50 / 2001             | - Pemberdayaan P3A.   |
| 3. Penyerahan Pengelolaan Irigasi. (PPI) | - Kepmen.Kimpraswil No. 529 /KPTS/ M/2001 | - Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A.                       |
| 4. Pendanaan Irigasi                     | - Kepmen. Keuangan No. 298 /KMK.02 / 2003 | - Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota.                         |
| 5. Keberlanjutan Irigasi                 | - (Belum terbit)                          | - (Belum terbit)  |

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Anonim, 1974. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan beserta Lembaran Tambahannya**, Jakarta 26 Desember 1974.
2. Anonim, 1999. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah beserta Lembaran Tambahannya**, Jakarta 7 Mei 1999.
3. Anonim, 1981. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan beserta Lembaran Penjelasannya**, Jakarta 25 Pebruari 1981.
4. Anonim, 1982. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air beserta Lembaran Penjelasannya**, Jakarta 12 Agustus 1982.
5. Anonim, 1982. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi beserta Lembaran Penjelasannya**, Jakarta 12 Agustus 1982.
6. Anonim, 2000. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom**, Jakarta 6 Mei 2000.
7. Anonim, 2001. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi beserta Lembaran Penjelasannya**, Jakarta 5 Desember 2001.
8. Anonim, 1989. **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air**, Jakarta 8 Nopember 1989.
9. Anonim, 2001. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**, Jakarta 14 Desember 2001.



10. Anonim, 2001. **Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**, Jakarta 10 Desember 2001.
11. Anonim, 1992. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)**, Jakarta 29 Juni 1992.
12. Anonim, 1998. **Surat Edaran Direktur Jenderal Pemerintah Urusan Otonomi Daerah tentang Pelaksanaan Program Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**, Jakarta 14 September 1998.
13. Anonim, 1999. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi**, Jakarta 26 April 1999.
14. Anonim, 1999. **Panduan Operasional Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP) Kelompok Pembina Lapangan (KPL) Tim Kecamatan/Desa**, Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Pengairan, Jakarta Juni 1999.
15. Anonim, 1999. **Pedoman Umum Penyerahan Pengelolaan Irigasi (PPI) di Indonesia**, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Jakarta 30 Agustus 1999.
16. Anonim, 1999. **Pola Pedoman Umum Pelaksanaan IPAIR Melalui Pemberdayaan P3A Dalam Rangka Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi**, Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (DITJEN. PUOD), Jakarta September 1999.
17. Hooja Joshi Rakesh L.K., 2000. **Participatory Irrigation Management (Paradigm for the 21th Century) Volume 1 & 2**, Rawat Publications, Jaipur & New Delhi 2000.
18. Kelompok Kerja Reformasi di Bidang Pengairan, 2001, **Kerangka Pelaksanaan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi Tahun 2002**, BAPPENAS-

Departemen Dalam Negeri-Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,  
Jakarta, Oktober 2001.

19. Rianingsih Djohani, 1996. **Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA) Berbuat Bersama Berperan Setara**, Penerbit Driya Media, Bandung Nopember 1996.
20. Rianingsih Djohani, 1996. **Kebijakan dan Strategi Menerapkan PRA Dalam Pengembangan Program (Buku Saku untuk Lembaga)**, Penerbit Driya Media, Bandung Nopember 1996.
21. Sigit S. Arif, Bayudono dan Eko Subekti, 2000, **Kajian Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Sistem Irigasi Partisipatif Menuju Wacana Baru Pengelolaan Irigasi (Sebuah Pengalaman di Daerah Istimewa Jogjakarta)**, Kongres dan Seminar KNI ICID, Bogor 16 – 17 Nopember 2000.
22. Salusu J., 2000, **Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit**, Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Juni 2000.
23. Triguno, 1996, **Budaya Kerja (Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja)**, Penerbit Ar-Noor, 1996.
24. Vermillion L. Douglas and Sagardoy A. Juan, 1999, **Guidelines Transfer Of Irrigation Management Services**, FAO, Rome Italy 1999.
25. Vermillion L. Douglas, 2000, **Guide To Monitoring And Evaluation Of Irrigation Management Services**, The Rural Development Department of the World Bank, The Japanese Institute for Irrigation and Drainage, and The International Network on Participatory, Tokyo Japan 2000.